



2019

PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

Untuk Komunitas Adat Terpencil
Implementasi, Hasil, dan Langkah-Langkah Perbaikan

PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL:

Implementasi, Hasil, dan
Langkah-Langkah Perbaikan



PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2019

Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil: Implementasi, Hasil, dan Langkah-Langkah Perbaikan

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Tim Penyusun

Bakti Utama, Indah Pratiwi, Sugih Biantoro

Penyunting Isi

Irsyad Zamjani, Lukman Solihin

Penyunting Bahasa

Sugih Biantoro, Imelda Widjaja

Desain sampul dan isi

Genardi Atmadiredja

ixxx + 80 hlm; 14,8 cm x 21 cm

ISBN: 978-602-0792-49-1

Penerbit :

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221-5736365

Faks. +6221-5741664

Website: <http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>

Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Juli 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2019 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2018. Penerbitan buku laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Salah satu judul hasil penelitian yang dimaksud adalah “Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil: Implementasi, Hasil, dan Langkah-langkah Perbaikan”. Penelitian ini sangat bermanfaat dalam rangka menjawab berbagai tantangan dan persoalan terkait dengan peran pemerintah dalam membangun pendidikan di daerah-daerah terpencil. Komunitas adat di daerah-daerah tersebut, biasanya membutuhkan pendidikan yang bersifat kontekstual di mana menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dan kearifan lokal yang mereka turunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kajian ini merupakan bentuk evaluasi dari program pemerintah yang menjadikan PKBM sebagai solusi dalam membangun pendidikan bagi komunitas adat di daerah-daerah terpencil.

Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai

pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lain, terutama bagi pihak terkait yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terutama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku laporan hasil penelitian ini.

Jakarta, Juli 2019

Kepala Pusat,



Muktiono Waspodo

KATA PENGANTAR

Sejak 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan telah melaksanakan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KD-KAT). Sebagaimana tajuknya, program tersebut dilaksanakan untuk mengentaskan buta aksara khususnya bagi penduduk usia dewasa di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Dalam tiga tahun ini, 55 komunitas adat telah menjadi sasaran program ini, sehingga program ini turut memberi kontribusi atas penurunan angka buta aksara, terutama di wilayah 3T.

Pelayanan pendidikan melalui jalur non-formal sebagaimana dijalankan dalam program ini dipandang sebagai langkah yang tepat untuk menciptakan pemerataan pelayanan pendidikan di wilayah 3T. Selain relatif lebih murah, jalur pendidikan non-formal dipandang dapat lebih fleksibel menghadapi berbagai tantangan pendidikan di wilayah 3T. Oleh karenanya, untuk mendukung program ini, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) tahun 2018 lalu telah melaksanakan kajian untuk melihat bagaimana pelaksanaan dan capaian program pendidikan KD-KAT ini. Hilir dari kajian ini adalah menyusun satu rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi program pendidikan KD-KAT pada tahun-tahun berikutnya.

Buku ini menuliskan temuan-temuan dan rekomendasi dari kajian evaluasi program pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil. Hasil penelitian ini tentu masih banyak kekurangan

dan perlu mendapat banyak masukan ke depannya. Namun, kami berharap *output* dari kajian ini dapat memberi kontribusi terutama bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, khususnya Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sebagai pengampu program pendidikan KD-KAT, sehingga capaian dan kebermanfaatan dari program ini semakin meningkat. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA.....	1
A. Sudahkah Layanan Pendidikan Kita Merata?.....	1
B. Paradigma Pendidikan Untuk Komunitas Adat.....	5
C. Kerangka Evaluasi.....	7
D. Metode.....	9
1. Lokasi Penelitian.....	9
2. Pengumpulan dan Analisis Data	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS	13
A. Latar Belakang dan Definisi Program.....	13
B. Prosedur Pelaksanaan Program	15
C. Proses Pembelajaran	21
D. Target dan Evaluasi.....	23
E. Peran dan Fungsi Para Pihak.....	24
1. Pemerintah pusat.....	24
2. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.....	24
3. PKBM/Kelompok Belajar (Kejar)/Yayasan Pendidikan.....	25
4. Penerima manfaat/komunitas adat	26

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL.	27
A. Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua	27
B. Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.....	35
C. Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	39
D. Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.....	54
1. PKBM Berkah.....	55
2. PKBM Pematang Baru.....	60
E. Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.....	62
BAB IV BEBERAPA CATATAN PROGRAM KD-KAT.....	65
A. Ketercapaian Program.....	65
B. Ketepatan Sasaran.....	67
C. Daya Jangkau Program	69
D. Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	70
E. Keberlanjutan Program.....	71
BAB V MENUJU PERBAIKAN PROGRAM.....	73
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR SINGKATAN

3T	: Tertinggal, Terdepan, Terluar
ACDP	: <i>Analitical and Capacity Development Partnership</i>
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Calistung	: Baca Tulis Hitung
CBE	: <i>Cultural Based Education</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
Ditbindiktara	: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
KAT	: Komunitas Adat Terpencil
KD-KAT	: Keaksaraan Dasar-Komunitas Adat Terpencil
Kejar	: Kelompok Belajar
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KUM	: Kelompok Usaha Mandiri
NPSN	: Nomor Pokor Sekolah Nasional
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PLS	: Pendidikan Luar Sekolah
PNF	: Pendidikan Non Formal
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPKK	: Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama
RPP	: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
SAD	: Suku Anak Dalam
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SKL	: Standar Kompetensi Lulusan
SM3T	: Sarjana Mengajar di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar

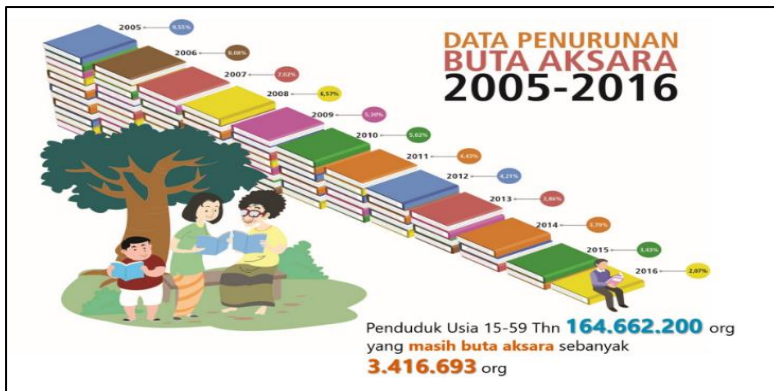
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMTK	: Sekolah Menengah Teologi Kristen
SUKMA	: Surat Keterangan Melek Aksara
TNBT	: Taman Nasional Bukit Tigapuluh
ULT	: Unit Layanan Terpadu
UU	: Undang-Undang Republik Indonesia

BAB I

MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Sudahkah Layanan Pendidikan Kita Merata?

Undang-undang telah mengamanatkan terciptanya pemerataan layanan pendidikan bagi setiap warga negara. UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa *“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”* Sementara itu pada pasal 4 ayat (1) dinyatakan juga: *“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”* Sayangnya, hingga saat ini belum semua warga negara mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Data Kemendikbud menunjukkan bahwa sekalipun terdapat penurunan angka buta aksara antara 2005-2016 namun masih terdapat kelompok masyarakat yang belum bisa membaca dan menulis. Pada penduduk Indonesia kategori usia 15-59 tahun yang seluruhnya berjumlah 164.662.200 orang, masih terdapat 3.416.693 orang yang buta aksara (<http://bindikmas.kemdikbud.go.id>, 2016).



Gambar 1.1. Penurunan Buta Aksara di Indonesia Tahun 2005-2016
Sumber: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Kemendikbud

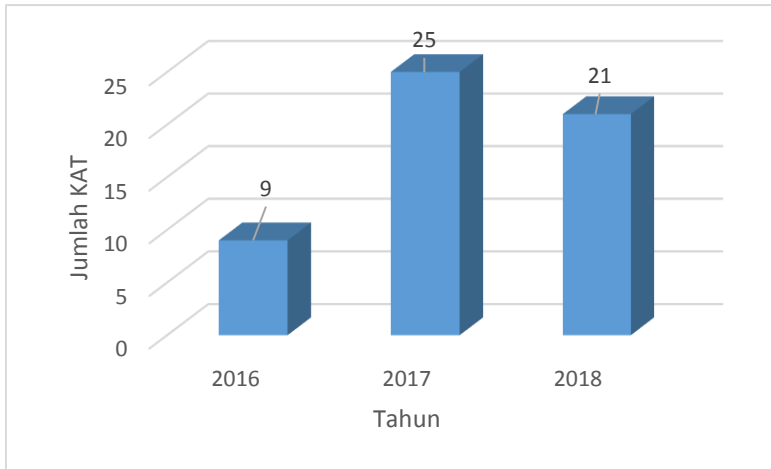
Masalah pemerataan pelayanan pendidikan ini, terutama masih menimpa komunitas-komunitas adat terpencil yang tinggal di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Studi-studi sebelumnya telah mencatat bahwa setidaknya terdapat dua hambatan bagi pemerataan pendidikan bagi komunitas adat terpencil ini. *Pertama*, sebagian dari masyarakat adat tersebut tinggal di wilayah yang secara geografis terisolir sehingga tidak terjangkau oleh fasilitas pendidikan (Bappenas, 2013; PPKK, 2016). *Kedua*, ketidaksesuaian antara sistem pendidikan nasional dan kondisi sosio-kultural komunitas adat terpencil (Anderson, 2013; ACDP, 2014; Puslitjakdikbud, 2017).

Di tengah permasalahan tersebut, pendidikan non-formal (PNF) dipandang memiliki beberapa keunggulan yang berpotensi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan bagi komunitas adat terpencil. *Pertama*, proses pembelajaran dalam PNF relatif fleksibel

sehingga dapat mengakomodasi beragam konteks sosio-kultural peserta didik. *Kedua*, materi pembelajaran dalam PNF lebih bersifat fungsional sehingga lebih berguna dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat/peserta didik. *Ketiga*, biaya dalam PNF relatif lebih murah. Kebutuhan dalam pelaksanaan PNF sering kali dapat dipenuhi oleh sumber daya yang tersedia pada komunitas di mana PNF tersebut dilaksanakan.

Berbagai program pada jalur PNF telah dilakukan Kemendikbud untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Salah satunya adalah Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus. Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan ini merupakan layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisis sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri pada komunitas adat terpencil/khusus (Ditbindiktara, 2016).

Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus telah dilaksanakan sejak 2016. Pada 2016 sejumlah 9 komunitas adat terpencil telah menerima program ini. Pada 2017, sasaran program ini meningkat menjadi 25 KAT. Kemudian pada 2018, program ini menysasar 21 KAT. Pada setiap komunitas program ini menysasar 100 warga belajar. Artinya, jika berjalan dengan baik, di akhir 2018 program ini dapat mengentaskan 5.500 orang komunitas adat terpencil dari buta aksara.



Grafik 1.1. Sasaran Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus

Sumber: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Kemendikbud

Buku yang Anda baca saat ini merupakan hasil evaluasi terhadap program pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus tersebut. Dalam buku ini, kami akan menguraikan bagaimana program ini dilaksanakan terutama di tingkat pelaksana program, menemukan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program, serta menyusun langkah-langkah untuk memperbaiki capaian program ini. Lebih jauh lagi, abstraksi dari temuan-temuan penelitian ini kami harapkan juga dapat membantu upaya perbaikan pelayanan pendidikan bagi komunitas adat.

Untuk memenuhi tujuan di atas, secara kritis kami mengajukan empat pertanyaan yang akan dijawab pada bab-bab selanjutnya. Empat pertanyaan tersebut adalah: (1) Bagaimana

pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan kesetaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? (2) Apakah tujuan pengentasan buta aksara bagi komunitas sasaran program tersebut telah tercapai? (3) Bagaimana kebermanfaatan program pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil bagi komunitas sasaran? (4) Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan capaian tujuan dan manfaat program tersebut?

B. Paradigma Pendidikan Untuk Komunitas Adat

Setidaknya terdapat dua pendekatan dalam pelayanan pendidikan bagi komunitas adat. Model pertama disebut dengan model modal manusia (*human capital model*). Model ini dikembangkan oleh Becker (1964) melalui karyanya yang berjudul *Human Capital*. Model ini berangkat dari asumsi bahwa setiap individu, atau dalam diskusi kita kali ini adalah warga komunitas adat, yang hendak diberi layanan pendidikan dipandang sebagai individu yang rasional (Timothy, Cameron & Bidle, Nicholas, 2012). Makna rasional di sini dalam pengertian ekonomi yaitu melihat pendidikan sebagai investasi. Dalam pengertian ini pendidikan dipandang akan meningkatkan performa individu dalam dunia kerja. Jadi, dalam pandangan model ini, tingkat keberhasilan individu utamanya ditentukan oleh pendapatan yang mereka terima.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu sering kali tidak dapat memastikan pendapatan yang akan mereka terima ketika mereka menerima/menolak layanan pendidikan. Dalam kondisi demikian, individu tersebut akan mengambil keputusan, apakah

dirinya akan berpartisipasi dalam pendidikan atau tidak, dengan membandingkan ekspektasi pendapatan yang akan diterima di masa depan dengan atau tanpa pendidikan. Dengan demikian, jika seseorang merasa bahwa tambahan pendapatan yang ia peroleh di masa depan lebih tinggi dari biaya pendidikan yang ia keluarkan, maka ia akan melakukan investasi dalam pendidikan. Dalam menimbang ekspektasi tersebut, informasi yang diterima setiap calon warga belajar mengenai pelayanan pendidikan menjadi penting, karena informasi yang berbeda akan menghasilkan ekspektasi yang berbeda.

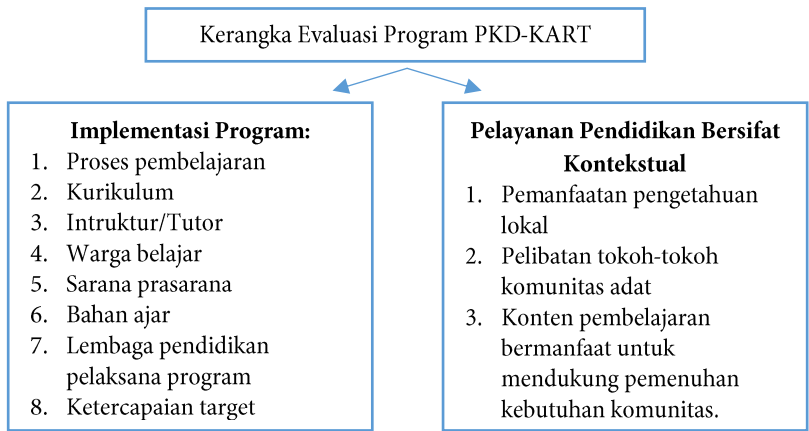
Berikutnya, model pendidikan bagi komunitas adat yang kedua sering disebut dengan model pendidikan berbasis budaya (*Cultural Based Education Model*). Secara umum, pendidikan berbasis budaya dapat dimaknai sebagai suatu sistem pendidikan yang dibangun di atas pengalaman, nilai-nilai, dan pengetahuan peserta didik baik secara personal maupun dalam kaitannya sebagai anggota komunitasnya (Jhon C, Towner & William G, Demmert, 2003). Berbeda dengan model yang pertama CBE didasarkan pada beberapa asumsi. *Pertama*, bahwa pendidikan harus memenuhi kebutuhan komunitas, yaitu dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari mereka. *Kedua*, pendidikan harus melindungi komunitas. Anak dilindungi secara mental maupun fisik. Orang-orang dewasa harus mendapat perlindungan dari eksploitasi terutama dari pihak-pihak dari luar komunitas. *Ketiga*, pendidikan harus mampu mengembangkan nilai-nilai positif dan mengoreksi kecenderungan negatif yang ada dalam komunitas. *Keempat*, pendidikan mampu meningkatkan *self-respect* dan kepercayaan diri yang ada dalam komunitas. *Kelima*, pendidikan mampu memberikan

pengetahuan-pengetahuan yang bersifat praktis. Pengetahuan praktis ini bermanfaat bagi komunitas baik untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka maupun agar mereka mampu menjadi tenaga kerja profesional. *Keenam*, pendidikan harus dikelola dengan menyesuaikan adat dan tradisi komunitas, serta mengoptimalkan sumber daya material dan manusia yang ada di dalam komunitas tersebut. *Keenam*, pendidikan harus dijalankan dengan memberikan penghargaan terhadap bahasa lokal. Penggunaan bahasa lokal dalam proses belajar dipercaya dapat mempermudah transmisi pengetahuan kepada peserta didik.

C. Kerangka Evaluasi

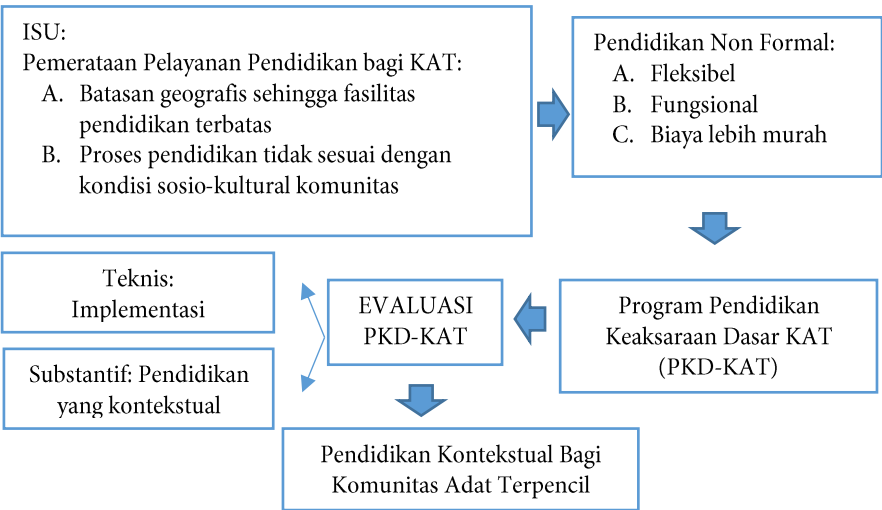
Dalam evaluasi program pendidikan KD-KAT ini, kami menetapkan dua kriteria sebagai acuan penilaian pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil. Kriteria *pertama* adalah implementasi program yaitu melihat apakah program berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Selanjutnya, kriteria ini kami turunkan dalam beberapa indikator penilaian seperti: (1) proses pembelajaran (2) kurikulum pembelajaran, (3) tutor/instruktur, (4) warga belajar, (5) sarana dan prasarana, (6) bahan ajar, dan (7) lembaga pendidikan pelaksana program. *Kedua*, evaluasi ini juga akan menilai apakah secara substansi pelaksanaan pendidikan yang dilakukan dalam program ini telah menerapkan prinsip-prinsip pendidikan berbasis budaya. Kriteria juga diturunkan dalam beberapa indikator penilaian, seperti (1) memanfaatkan dengan tetap menghormati pengetahuan dan bahasa lokal, (2) pelibatan tokoh komunitas adat, dan (3) konten pembelajaran bermanfaat untuk mendukung

pemenuhan kebutuhan komunitas. Dalam bentuk skematis, kerangka berpikir di atas digambarkan dalam diagram berikut.



Sementara itu, keseluruhan alur berpikir penelitian ini tergambar dalam diagram di bawah ini:

Alur Berpikir Penelitian Evaluasi Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil



D. Metode

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan melihat implementasi program keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus tahun 2016 dan 2017. Secara keseluruhan terdapat 34 KAT yang disasar dalam program ini pada dua tahun tersebut. Dari 34 komunitas adat terpencil tersebut, kami akan mengambil lima sampel komunitas adat terpencil penerima program ini. Kelima sampel tersebut adalah Suku Bajo (Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara), Suku Tengger (Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur), Suku Dani (Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua), Suku Talang Mamak (Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau), dan Suku Anak Dalam (Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi).

Pemilihan sampel tersebut didasarkan pada beberapa kriteria. *Pertama*, keterwakilan sampel dari masing-masing tahun pelaksanaan. *Kedua*, keragaman konteks sosio-kultural komunitas adat. *Ketiga*, keterjangkauan lokasi disesuaikan dengan sumber daya penelitian ini.

2. Pengumpulan dan Analisis Data

Data dalam evaluasi ini dikumpulkan melalui beberapa cara, seperti: studi pustaka, observasi, wawancara, dan diskusi kelompok. Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri dokumen pelaksanaan program, publikasi program, serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Penelusuran pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program, maupun konteks sosio-kultural dari masing-masing komunitas adat terpencil.

Observasi/pengamatan dilakukan untuk memperkuat informasi mengenai konteks sosio-kultural dari komunitas adat sasaran program. Wawancara dan diskusi kelompok dilakukan kepada pelaksana program baik di tingkat pusat maupun di daerah, peserta didik, tokoh-tokoh adat, antropolog serta pakar pendidikan non-formal. Wawancara dan diskusi kelompok ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai perencanaan dan pelaksanaan program, permasalahan yang dihadapi, serta mendiskusikan strategi-strategi alternatif yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan program pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/ khusus.

Untuk evaluasi terhadap program pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus ini, data dikategorikan berdasarkan kriteria dan indikator evaluasi. Kriteria yang dimaksud adalah implementasi program dan penerapan prinsip-prinsip pendidikan integral/ Pendidikan Berbasis Budaya (*Cultural Based Education*). Di setiap kriteria tersebut, peneliti juga akan menelusuri mengapa kondisi tersebut dapat terjadi sehingga dapat disusun strategi untuk menyempurnakan capaian program ini.

E. Sistematika Penulisan

Tulisan ini akan kami sajikan dalam lima bab. Pada bab pembuka ini, kami telah menguraikan latar belakang, fokus penelitian dan signifikansi dari penelitian ini. Seperti telah kami uraikan, penelitian ini merupakan penelitian kebijakan untuk mengoptimalkan capaian program pendidikan keaksaraan dasar bagi komunitas adat terpencil/khusus. Pada bab ini kami juga telah menguraikan orientasi teoretis yang mendasari kajian ini serta implikasi metodologisnya.

Pada bab dua, kami akan menuliskan gambaran program pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus. Perhatian kami adalah pada bagaimana latar belakang program ini serta gagasan pelaksanaan program sejak disosialisasikan hingga *output* yang hendak dicapai. Kami juga akan menyoroti berbagai pihak yang terlibat dan peran mereka dalam program ini.

Bab tiga adalah ruang untuk mendiskusikan implementasi dari program ini. Pada bab ini kami akan menguraikan pelaksanaan program di lima lokasi, yaitu: Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua, Kabupaten Konawe Kepulauan di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi, dan Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau. Dalam bagian ini kami akan mendeskripsikan bagaimana program ini disosialisasikan, proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh masing-masing PKBM, serta capaian program di masing-masing lokasi.

Pada bab empat, kami akan menguraikan capaian dari program ini di lima lokasi penelitian. Pada bab ini kami juga akan menguraikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program. Seperti akan kami sampaikan nanti, setidaknya ada empat catatan yang hendak kami uraikan, yaitu: ketercapaian program, ketepatan sasaran program, daya jangkauan program, keterbatasan SDM, serta keberlanjutan program.

Berdasarkan atas catatan kritis pada bab empat ini, pada bab terakhir kami akan menuliskan bab penutup, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dari kajian ini yang secara

garis besar bertujuan untuk mengoptimalkan capaian program pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS

A. Latar Belakang dan Definisi Program

Pengentasan buta aksara merupakan cita-cita luhur bangsa. Pada Pembukaan UUD 1945, alinea ke 4 disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya negara ini adalah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Keharusan memberantas buta aksara juga menjadi perhatian dunia internasional di mana Indonesia menandatangani deklarasi Persepolis pada tahun 2013 tentang komitmen setiap negara untuk selalu menaruh perhatian terhadap pemberantasan buta aksara. Pemberantasan buta aksara dalam hal ini dipandang sebagai sebuah jalan bagi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Untuk menekan angka buta aksara, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjend PAUD dan Dikmas) pada tahun 2016 membuat sebuah program untuk memberikan layanan pendidikan pada kantung-kantung buta aksara. Program tersebut salah satunya adalah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar bagi Komunitas Adat Terpencil (KD-KAT). Selain pengentasan buta aksara, harapan program ini adalah dapat

memperluas akses penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar bagi orang dewasa, serta memberikan peluang kepada satuan pendidikan nonformal, formal, yayasan, dan organisasi lainnya untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar.

Secara definisi, yang dimaksud dengan program Keaksaraan Dasar adalah layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisis sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri. Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, komunitas adat terpencil/khusus adalah komunitas sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Komunitas adat terpencil ini biasanya merupakan sekelompok masyarakat yang kerap memilih untuk mengasingkan diri dari orang-orang “luar”. Komunitas ini memiliki ciri yang khas yaitu masih mempertahankan adat dan kebiasaan leluhurnya dan masih menganut kepercayaan yang sama dengan leluhurnya.

Dari penjabaran di atas, maka definisi Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus adalah layanan pendidikan bagi warga masyarakat buta aksara latin, khususnya komunitas adat terpencil/khusus, agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisis sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri. Sasaran utama program ini adalah penduduk buta aksara usia 15-59 tahun. Dalam rentang usia tersebut, program ini memprioritaskan warga belajar pada usia 45 tahun ke atas. Warga

belajar usia di bawah 45 tahun diasumsikan masih bisa mengikuti pendidikan formal.

B. Prosedur Pelaksanaan Program

Program ini dimulai dari tahapan sosialisasi. Tujuan tahapan ini adalah menyebarkan informasi mengenai program pendidikan KD-KAT. Keberhasilan sosialisasi dapat menentukan keberhasilan bahkan kelanjutan sebuah program. Program KD-KAT ini pertama kali dikenalkan pada 2016 oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Ditbindiktara) di bawah Dirjen PAUD dan Dikmas.

Sebelum sosialisasi, Ditbindiktara terlebih dahulu melakukan pemetaan. Melalui pemetaan direktorat menetapkan target sasaran komunitas adat agar program dapat tepat sasaran. Terdapat beberapa metode sosialisasi yang dilakukan oleh Ditbindiktara. *Pertama*, sosialisasi langsung yaitu proses sosialisasi dilakukan secara langsung oleh direktorat melalui *website* kepada masyarakat. Metode ini sebetulnya bisa dianggap efektif karena pihak yang mengadakan program dapat berhadapan langsung dan memberikan penjelasan terperinci terkait program untuk mengurangi kesalahpahaman karena masyarakat mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Namun sayangnya, dalam *website* tidak tercantum laman forum diskusi atau layanan bagi komunitas/lembaga yang dituju. Forum diskusi penting untuk memberikan layanan tanya jawab seputar program.

Sosialisasi yang *kedua* dilakukan dengan cara tidak langsung, atau melalui perantara. Metode ini efisien dari segi waktu, namun kurang menjamin dari segi hasil karena masyarakat tidak

mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Dalam hal ini direktorat memberikan sosialisasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota melalui koordinasi langsung dan surat edaran yang menghimbau untuk menyosialisasikan program kepada lembaga pendidikan di komunitas sasaran.

Pada tahap selanjutnya, lembaga calon pelaksana program dapat mengusulkan bantuan pada Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, petugas administrasi ULT akan memasukkan data usulan dari lembaga dan meneruskan ke Ditbindiktara. Penilaian proposal dilakukan oleh tim penilai dari Ditbindiktara dengan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan.

Proses penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan proposal yang diusulkan oleh lembaga/organisasi mitra pendidikan masyarakat. Selain itu, dari penilaian tersebut diharapkan dapat mengetahui dan memetakan lembaga/organisasi mitra pendidikan masyarakat calon penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar pada komunitas adat terpencil/khusus.

Berdasarkan hasil penilaian/verifikasi usulan yang dilakukan oleh tim penilai, Ditbindiktara akan menetapkan jumlah bantuan kepada setiap pengusul program pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus. Terakhir, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ditbindiktara menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang lembaga penerima dana bantuan program keaksaraan

dasar komunitas adat terpencil/khusus yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Jika SK sudah diterbitkan, langkah selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar. Dalam hal ini, PPK Ditbindiktara selaku pihak pertama melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan lembaga penerima bantuan program pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus selaku pihak kedua.

Dana bantuan operasional akan diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan operasional melalui ke rekening penerima. Pencairan dana dilakukan secara sekaligus berdasarkan pertimbangan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan. Setelah pencairan, lembaga penerima dapat langsung memberikan layanan pendidikan kepada sasaran program sesuai dengan yang telah diajukan. Jumlah dana yang disediakan oleh Ditbindiktara tahun 2016 untuk pendidikan keaksaraan dasar bagi komunitas adat terpencil/khusus sebesar Rp2.500.000.000 untuk membelajarkan sebanyak 1.000 orang peserta didik. Alokasi dana bantuan operasional pada 2016 didistribusikan kepada komunitas adat terpencil/khusus seperti tabel berikut:

Tabel 2.1. Lokasi Komunitas Adat Penerima Bantuan

No.	Nama Komunitas Adat	Lokasi
1	Suku Anak Dalam	Kabupaten Sarolangun, Prov. Jambi
2	Suku Baduy	Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
3	Suku Samin	Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah
4	Suku Sasak Bayan	Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB

No.	Nama Komunitas Adat	Lokasi
5	Suku Dayak	Kabupaten Barito Utaram Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
6	Suku Bajo	Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara
7	Suku Kajang	Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
8	Suku Dani	Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua
9	Suku Talang Mamak	Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau

Sumber: Buku Petunjuk Teknis Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016.

Pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar bagi komunitas adat terpencil/khusus mengorganisir peserta didik dalam rombongan belajar (rombel), di mana setiap rombel berjumlah 10 orang warga belajar, sehingga dana yang disediakan setiap rombel adalah $10 \text{ orang} \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$ (dua puluh lima juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk membiayai komponen-komponen seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Komponen Pembiayaan

No.	Komponen yang Dibiayai	Perincian	Proporsi Biaya
1	Identifikasi calon warga belajar untuk 10 orang	Pendataan calon peserta didik	Maksimal 2,5% (Rp625.000)
2	Alat tulis dan buku tulis untuk 10 orang warga belajar	Pensil, Pulpen, penghapus, buku tulis, dan lain-lain	Maksimal 5% (Rp1.250.000)

No.	Komponen yang Dibiayai	Perincian	Proporsi Biaya
3	Pembelajaran keaksaraan dasar untuk 10 warga belajar	Penyusunan/pembelian bahan belajar dan/atau bahan praktik	Minimal 15% (Rp3.750.000)
4	Penyelenggaraan penilaian pembelajaran untuk 10 orang warga belajar	Pengadaan soal, penyelenggaraan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan penulisan SUKMA	Maksimal 3,5% (Rp850.000)
5	Motivasi peserta didik	Bantuan peserta didik	Maksimal 10% (Rp 2.500.000)
6	Transportasi tutor untuk 10 orang warga belajar.	Transportasi 2 tutor selama kegiatan	Minimal 40% (Rp 10.000.000)
7	Pengendalian program	Transportasi penyelenggara, evaluasi kegiatan, dan pelaporan	Maksimal 12% (Rp3.000.000)
8	Ekspose/pemaparan hasil program	Penyusunan bahan dokumentasi dalam bentuk cetak dan video pembelajaran serta pemaparan hasil program	Maksimal 12% (Rp3.000.000)
Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 warga belajar			Rp25.000.000

Sumber: Buku Petunjuk Teknis Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016.

Berbeda dengan tahun 2016, jumlah dana yang disediakan oleh Ditbindiktara tahun 2017 untuk pendidikan keaksaraan dasar bagi komunitas adat terpencil/khusus sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk membelajarkan sebanyak 2.500 peserta didik @Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Alokasi ini

lebih kecil dari tahun sebelumnya namun jumlah sasaran yang diberikan lebih banyak, yaitu:

Tabel 2.3. Komunitas Adat Penerima Bantuan Tahun 2017,

No.	Nama Komunitas Adat/ Khusus	Lokasi Kabupaten/Provinsi	Jumlah (org)
1	Suku Anak Dalam	Kab. Sarolangun, Prov. Jambi	100
2	Suku Anak Dalam	Kab. Tebo, Prov. Jambi	100
3	Suku Anak Dalam	Kab. Batanghari, Prov. Jambi	100
4	Suku Laut	Kab. Karimun, Prov. Kepri	100
5	Suku Sakai	Kab. Siak, Prov. Riau	100
6	Suku Akit/Asli	Kab. Kepulaun Meranti, Prov. Riau	100
7	Suku Talang Mamak	Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau	100
8	Suku Baduy	Kab. Lebak, Prov. Banten	100
9	Suku Samin	Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah	100
10	Suku Tengger	Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur	100
11	Suku Sasak Bayan	Kab. Lombok Utara, Prov. NTB	100
12	Suku Sasak Watu Telu	Kab. Lombok Timur, Prov. NTB	100
13	Komunitas Cirendeu	Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat	100
14	Suku Dayak	Kab. Barito Timur Provinsi Kalteng	100
15	Suku Dayak Banjar	Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalsel	100
16	Suku Dayak	Kab. Nunukan, Prov. Kaltara	100
17	Suku Bajo	Kab. Konawe Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara	100
18	Suku Bajo	Kab. Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara	100
19	Suku Tolaki	Kab. Kolaka Timur, Prov. Sulawesi Tenggara	100
20	Suku Polahi	Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo	100
21	Suku Kajang	Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan	100
22	Suku Bunggu	Kab. Mamuju Utara, Prov. Sulawesi Barat	100
23	Suku Kaili	Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah	100
24	Suku Dani	Kab. Lanny Jaya, Prov. Papua	100
25	Suku Oseng	Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur	100
Jumlah			2.500

Catatan: Apabila sasaran pada komunitas di atas tidak terserap, maka akan dialihkan ke komunitas lain yang membutuhkan dan memungkinkan.

Sumber: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Kemendikbud.

Sayangnya di tahun 2017 lembaga penerima bantuan tidak diberi acuan dalam pembiayaan selama program bantuan sebagaimana tahun 2016. Dengan tidak ada petunjuk teknis penggunaan anggaran ini lembaga akan menemukan kendala dalam peruntukan kegiatan belajar dan mengajar di komunitas.

C. Proses Pembelajaran

Proses kegiatan belajar mengajar merupakan inti program karena menyangkut implementasi strategi dalam mendapatkan *output* sesuai dengan yang diharapkan. Mekanisme program pembelajaran dalam pendidikan keaksaraan dasar dilakukan minimal selama 114 jam, setiap jam pelajaran 60 menit, dengan jadwal hari yang lebih fleksibel. Banyaknya jam pelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar pendidikan keaksaraan dasar. Proses pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar merupakan tahap pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), standar isi, dan standar penilaian pendidikan keaksaraan dasar dengan komponen pelajaran yaitu menulis dan membaca huruf sederhana serta perhitungan dasar. Dalam program ini, proses pembelajaran diharapkan menggunakan pendekatan tematik, terpadu, dan fungsional. Melalui pendekatan ini, proses pembelajaran akan terintegrasi dengan permasalahan kehidupan sehari-hari bagi peserta didik.

Proses pembelajaran diharapkan menyatu dengan kondisi sosio-kultural warga belajar seperti: agama, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, keterampilan, dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya tutor dibolehkan menggunakan metode pembelajaran secara pedagogis (pembelajaran untuk anak),

andragogis (pembelajaran untuk orang dewasa), dan/atau heutagogis (pembelajaran secara mandiri), secara proporsional dan mengedepankan tumbuhnya motivasi dan keinginan belajar peserta didik.

Perencanaan proses pembelajaran merupakan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk setiap muatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disepakati bersama antara pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar, materi, dan media belajar harus bervariasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungan alam, sosial, serta budaya setempat. Perencanaan proses pembelajaran dimuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menguraikan tentang:

1. identitas lembaga;
2. kompetensi dasar;
3. materi pokok;
4. alokasi waktu;
5. tujuan pembelajaran;
6. indikator pencapaian kompetensi;
7. metode pembelajaran;
8. kegiatan pembelajaran;
9. media, alat, dan sumber belajar; dan
10. penilaian pembelajaran.

Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal warga belajar per rombongan belajar dan rasio jumlah pendidik terhadap peserta didik yang sesuai dengan situasi

dan kondisi serta proses pembelajaran melalui tatap muka dan/atau tutorial.

D. Target dan Evaluasi

Setelah tahap pembelajaran selesai proses berikutnya merupakan proses penilaian. Penilaian adalah pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian pembelajaran dan hasil belajar peserta didik pendidikan keaksaraan dasar. Penilaian oleh pendidik dilakukan pada awal, proses, dan akhir pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar. Penilaian dilakukan oleh lembaga penyelenggara program dalam beberapa tahapan. Penilaian pertama atau penilaian awal merupakan upaya evaluasi untuk mengetahui kemampuan awal membaca, menulis, dan berhitung.

Kemudian evaluasi selanjutnya adalah penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor mengadakan penilaian terhadap peserta didik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan (SKL) dengan menggunakan berbagai cara, seperti melalui portofolio, observasi, penilaian diri, uji kompetensi dan/atau penilaian lain yang diperlukan untuk mengukur kompetensi secara utuh yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk melihat kredibilitas dan integritas lembaga dalam proses penilaian selanjutnya dilakukan penilaian akhir oleh Dinas Kabupaten/Kota untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan keaksaraan dasar.

Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai standar kompetensi lulusan sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan

lulus/selesai dan diberikan surat keterangan melek aksara (SUKMA). Indikator keberhasilan dalam program ini adalah minimal 80% peserta dinyatakan lulus dan memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Hasil penilaian peserta didik diharapkan diumumkan maksimal satu bulan setelah pelaksanaan penilaian akhir. SUKMA diterima oleh peserta didik selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pengumuman hasil ujian.

E. Peran dan Fungsi Para Pihak

Untuk menjamin kesuksesan program ini dibutuhkan dukungan sejumlah pihak seperti pemerintah daerah, PKBM, dan dukungan masyarakat sekitar. Berikut ini adalah peran dan fungsi dari para pihak dalam program ini:

1. Pemerintah pusat

Pemerintah pusat dalam hal ini Ditbindiktara berperan sebagai pembuat program dan memiliki kewajiban penuh dalam menyiapkan petunjuk teknik dan panduan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar. Sebagai penyelenggara, pemerintah pusat memegang kendali penuh dalam menyiapkan anggaran dan membuat mekanisme dalam menyalurkannya. Tugas pemerintah pusat juga mengarahkan tutor dan pengelola pendidikan keaksaraan dasar dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selama proses berjalan pemerintah pusat berkewajiban melakukan pemantauan dan pembinaan program pendidikan keaksaraan dasar kepada dinas dan lembaga pelaksana program.

2. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

Dalam program keaksaraan dasar peran dinas adalah sebagai perantara antara pemerintah pusat dan lembaga. Dalam tahap awal

dinas bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menerjemahkan konsep program yang akan dilakukan atau memberikan informasi terkait program kepada lembaga atau masyarakat agar program dapat diterima dengan baik.

Selama proses berjalan, dinas pendidikan kabupaten/kota harus melakukan pendampingan terhadap lembaga penyelenggara dalam melaksanakan dan mengendalikan program agar terlaksana sesuai dengan juknis dan pedoman pendidikan keaksaraan dasar. Dalam hal ini, dinas berfungsi juga sebagai fasilitator sekaligus pengawas agar program berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk menjaga agar program dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, dinas pendidikan kota harus melakukan pemantauan dan pembinaan program secara berkala dan berkelanjutan. Terakhir, peran dan fungsi dinas adalah mencari solusi dan jalan keluar atas permasalahan dan hambatan yang dialami oleh lembaga dalam pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar.

3. PKBM/Kelompok Belajar (Kejar)/Yayasan Pendidikan

Salah satu bagian penting dalam program ini adalah lembaga yang diberikan kewenangan dalam mengelola program. PKBM/Kejar/Yayasan Pendidikan merupakan fungsi vital dalam program ini. Pada awal program, PKBM bertugas untuk mencari sasaran warga belajar. Langkah ini biasanya dimulai dengan langkah pendataan dan pendekatan pada warga belajar dengan didampingi oleh dinas pendidikan setempat.

Selain melakukan pendataan warga belajar, PKBM tentunya memiliki fungsi utama sebagai wadah berbagai kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan

sikap yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan masyarakat. Artinya dalam hal ini PKBM memiliki kewajiban untuk menyediakan tutor, serta sarana pendukung dalam proses belajar dan mengajar pada sasaran program.

Fungsi lain dari PKBM adalah sebagai pusat informasi bagi masyarakat sekitar, berkaitan dengan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar yang seharusnya dapat menjawab masalah kebutuhan masyarakat melalui program pembelajaran. Untuk itu dalam hal ini PKBM diharapkan dapat bekerja sama dengan warga belajar dan tokoh masyarakat setempat dengan melakukan koordinasi, konsultasi, komunikasi, dan musyawarah para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pembina teknis dalam merencanakan proses pembelajaran dan pemberdayaan di masyarakat.

4. Penerima manfaat/komunitas adat

Komunitas adat dalam hal ini adalah sebagai warga belajar merupakan sebagian dari komunitas binaan yang berhak mengikuti satu atau lebih program pembelajaran keaksaraan dasar. Warga belajar berhak memperoleh layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh PKBM dan berhak mendapatkan informasi mengenai manfaat dan program Keaksaraan Dasar KAT. Dalam pelaksanaannya, komunitas adat diharapkan untuk menghadiri setiap program tatap muka yang diselenggarakan oleh PKBM yang telah ditentukan. Untuk melihat capaian program warga belajar diharuskan mengikuti ujian pada setiap materi untuk meraih SUKMA. Warga belajar juga diharapkan berperan aktif dalam proses belajar mengajar agar proses berjalan sukses sesuai dengan target capaian.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Bab ini akan mendeskripsikan pelaksanaan program di lima lokasi yang menjadi sasaran penelitian ini. Kelima lokasi tersebut adalah Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua, Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi, dan Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau. Untuk mendeskripsikan program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KD-KAT) ini, terlebih dahulu akan kami uraikan konteks wilayah dan kondisi sosial budaya di masing-masing lokasi. Setelahnya, akan kami deskripsikan pelaksanaan program pada kelima lokasi tersebut.

A. Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua

Sasaran program keaksaraan dasar salah satunya dilaksanakan di Provinsi Papua di Kabupaten Lanny Jaya. Sejak tahun 2016, Kabupaten Lanny Jaya dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program tersebut. PKBM yang menerima program secara berturut-turut adalah PKBM Hadasah di Distrik Kuli (Desa Indugu) dan PKBM Wagunik di Distrik Tiom.

Pada tahun 2016, Program keaksaraan dasar di Lanny Jaya dijalankan oleh PKBM Hadasah. Sejak tahun 2007 Yayasan Indonesia Cerdas (pengelola PKBM Hadasah) telah memberikan perhatian pada permasalahan pendidikan di Papua. Namun, pada tahun 2016 yayasan tersebut resmi membuat PKBM dengan nama PKBM Hadasah.

Sejak mendapat amanat untuk menuntaskan buta aksara dari Ditbindiktara, PKBM Hadasah menyalurkan bantuan pendidikan tersebut melebihi sasaran yang ditetapkan oleh direktorat. Jika direktorat menetapkan target pengentasan buta aksara di dalam satu PKBM sebanyak 100 warga belajar, PKBM Hadasah justru mampu menjangkau 2 kali lipat jumlah warga belajar yang bisa diberikan pembelajaran keaksaraan, yaitu pada 200 warga belajar. Dua ratus warga belajar tersebut terbagi dalam empat distrik, yaitu di Distrik Tiom (Desa Kuyawage), Luneri (Desa Indugu), Poga (Desa Maki), dan Indawa (Desa Tiomneri). Warga belajar tersebut dibagi menjadi masing-masing satuan belajar yang berjumlah 20 orang. Dengan demikian, setidaknya PKBM Hadasah memiliki 10 rombongan belajar. Biasanya masing-masing satuan warga belajar didampingi oleh 2 orang tenaga pengajar. Masing-masing tenaga pengajar akan disebar di sejumlah distrik, sehingga PKBM ini memiliki total 20 tenaga pengajar dengan jadwal masing-masing 3 kali seminggu selama 3 jam.

PKBM Hadasah membuat silabus dan RPP sendiri dengan memperhatikan konteks kewilayahan. Di PKBM ini para warga belajar tidak hanya diberikan keaksaraan dasar tetapi juga langsung diberikan keterampilan seperti merajut, membuat noken dengan tulisan, beternak, dan membuat kerajinan lain sebagai upaya

pembelajaran dan pemberdayaan. Sumber daya PKBM ini selain dari APBN (program-program pemerintah) juga didukung oleh Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan-perusahaan lokal. Setelah berakhirnya program dari direktorat, PKBM Hadasah masih melakukan kegiatan belajar mengajar pada warga belajar. Saat penelitian ini dilakukan, misalnya, PKBM ini masih menjalankan keaksaraan lanjutan (Kelompok Usaha Mandiri/KUM).

Pada 2017, penerima pelaksana program pendidikan KD-KAT di Kabupaten Lanny Jaya adalah PKBM Wagunik. PKBM ini diketuai oleh Ibu Levina Howey yang juga merupakan pegawai pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya. PKBM Wagunik berdiri pada 2016 dan terletak di Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya. Lokasi pembelajaran berada di dua titik, yaitu di Wagunik sejumlah 25 orang dan di Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) 25 orang.

Di Lanny Jaya secara keseluruhan terdapat 13 PKBM lain yang berafiliasi dengan gereja. Dibandingkan dengan 13 PKBM lain di Kabupaten ini, PKBM Wagunik cenderung masih baru dan belum memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan PKBM seperti PKBM-PKBM lainnya yang berada di bawah naungan gereja. Hal ini terbukti dengan tidak adanya RPP dan Silabus yang dibuat oleh PKBM dikarenakan pengelola merasa belum tahu cara membuatnya. Dalam kunjungan di Lanny Jaya, tim juga bertemu dengan sejumlah PKBM lain bahkan berkunjung ke lokasi PKBM tersebut yang rata-rata berdiri di tahun 2010-an atau bahkan sudah lebih lama dari itu.

Saat tim melakukan observasi ke salah satu lokasi belajar PKBM Wagunik yang berada di SMTK, tutor dan warga belajar justru tidak mengenal PKBM Wagunik. Nama PKBM yang lebih dikenal di sana bernama PKBM Longgalo milik gereja yang berada di SMTK. Para tutor yang mengajar di SMTK Tiom (PKBM Longgalo) mengatakan bahwa catatan administrasi seluruh warga belajar Longgalo resmi tercatat sebagai warga belajar Wagunik pada data Dapodik per tahun 2017. Sementara, PKBM Longgalo sampai saat ini secara rutin melaksanakan program keaksaraan justru tidak memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) sehingga tidak dapat mendaftarkan dirinya dalam sistem Dapodik di situs Kemendikbud. Sehubungan dengan hal ini, dalam deskripsi selanjutnya, PKBM Wagunik akan kami sebut sebagai PKBM Longgalo.

Dalam proses pembelajaran, PKBM di Papua tampaknya tidak mensyaratkan kualifikasi khusus bagi tutor. Baik di PKBM Hadasah maupun di PKBM Wagunik (Longgalo) tidak disyaratkan harus berlatar belakang keguruan atau pendidikan PLS. Fenu misalnya, seorang tutor dari PKBM Longgalo merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Kristen yang direkrut oleh gereja untuk pelayanan kemudian diperbantukan di PKBM Longgalo. Sementara tutor yang lain, Maria Woniana, meskipun memiliki latar belakang sarjana pendidikan, tetapi merupakan pendidikan agama kristen dan belum pernah mengajar keaksaraan pada siswa dewasa sebelumnya. Kedua, pengajar ini belum pernah memiliki pengalaman mengajar keaksaraan dasar. Akibatnya praktik pembelajaran dilakukan dengan mengadopsi kurikulum SD.

Sebelum proses belajar dimulai biasanya para tutor berusaha agar dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat terlebih dahulu. Tutor-tutor dari PKBM baik dari Hadasah maupun Longgalo biasanya melakukan pendekatan kepada masyarakat terlebih dahulu dengan cara makan bersama penduduk setempat, berkebun bersama bahkan tidur di honai agar dapat berbaur dengan warga dan dapat diterima dengan baik. Pendekatan biasanya dilakukan 1-2 minggu.

Menurut pengakuan tutor-tutor tersebut, kendala terberat untuk berbaur dengan warga adalah kendala bahasa karena sebagian besar komunitas suku Danny masih menggunakan bahasa Lanny sebagai bahasa kesehariannya dan hanya satu atau dua orang yang sudah mengerti bahasa Indonesia. Sementara para pengajar yang tersedia merupakan pengajar dari kawasan lain seperti pengajar dari Hadasah merupakan asli Sentani dengan bahasa yang berbeda dan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Begitu juga dengan tenaga pengajar dari Wagunik yang merupakan warga asli NTT dengan bahasa sehari-hari bahasa Indonesia.

Kesamaan lain dari 2 PKBM ini adalah tempat pembelajaran yang masih meminjam ruangan pada gereja. Di PKBM Hadasah proses pembelajaran menggunakan bangunan Gereja Indugu, sementara di PKBM Longgalo proses pembelajaran menggunakan satu ruangan dari SMTK yang dipinjamkan khusus untuk pembelajaran keaksaraan dan kesetaraan. Yang menarik dari PKBM Longgalo adalah SMTK juga meminjamkan sejumlah tanah untuk tempat tinggal sementara para warga belajar karena jarak tempuh warga belajar dari rumah ke tempat belajar bisa memakan waktu 2 hari berjalan kaki karena belum memiliki akses kendaraan.

Di tanah tersebut warga belajar membangun honai-honai tepat di belakang bangunan SMTK dengan swadaya sendiri. Honai-honai ini berisi 7-12 orang dan dijadikan tempat bermukim selama 3 tahun untuk belajar keaksaraan dan puji-pujian. Selama proses belajar, warga belajar perempuan dipisah dengan laki-laki.

Pendidikan di Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki permasalahan yang lebih kompleks dibanding pendidikan di kota. Untuk menyelenggarakan pendidikan, lembaga harus bekerja lebih keras untuk menarik minat warga belajar agar mau datang dan belajar. Pada pendidikan orang dewasa, para warga belajar merupakan orang dewasa yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi dirinya atau keluarganya. Biasanya waktu belajar merupakan waktu mereka untuk berkebun, berburu, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pengelola PKBM harus bisa membuat daya tarik belajar dengan memberikan jaminan atau pengganti waktu produktif mereka dengan memberikan makanan saat kegiatan belajar berlangsung.

Di PKBM Hadasah misalnya, guru harus mau berjalan kaki sejauh 8 jam perjalanan sambil membawa makanan atau masakan siap makan agar siswa mau datang untuk belajar. Di PKBM Longgalo, guru dan lembaga menjamin hidup para peserta didiknya dengan memberikan sejumlah lahan untuk berkebun dan hasil kebunnya bisa diambil kapan pun mereka butuhkan. Para tutor mengatakan bahwa usaha yang mereka lakukan ini relatif efektif menarik minat warga untuk belajar keaksaraan dasar. Daya tarik berupa makanan ini tentu bukan hal yang sedikit dan membutuhkan kerelaan lembaga karena tidak ada alokasi “*advertising*” atau “*welfare guarantee*” dalam program ini.

Setelah guru membuat makanan dan menjemput peserta didik, hal ini juga tidak menjamin bahwa warga mau ikut belajar. Para penyelenggara program harus mampu mencari titik utama warga untuk belajar sesuai dengan konteks komunitasnya. Di Papua misalnya, sebagian besar komunitas merupakan penganut Kristen Katolik maupun Protestan. Di sejumlah kawasan biasanya hanya ada 1 atau 2 orang pendeta yang melakukan pelayanan pada umat secara bergantian dengan jarak tempuh yang bisa ratusan kilometer.

Untuk memudahkan komunitas, biasanya warga belajar tertarik untuk belajar agar bisa membaca puji-pujian di kampungnya dan melakukan pengabdian kepada gereja agar kampungnya bisa terus mengadakan kebaktian setiap minggunya. Lisina misalnya, salah satu warga belajar dari PKBM Longgalo, mengaku termotivasi belajar karena di kampungnya sebagian besar masih buta aksara. Lisina menekadkan diri untuk belajar di PKBM dan menetap di Honai selama 3 tahun dan terpisah dari suami dan keluarganya agar nanti bisa menyelenggarakan kebaktian di kampung halamannya.

Lisina juga memperoleh didikan oleh PKBM Longgola sebagai kader dengan menjadikan lulusan-lulusan PKBM ini sebagai tutor sebaya agar bisa mengajarkan ilmu tersebut di kampungnya. Selain motivasi pengabdian, motivasi menjadi PNS dan kepala kampung juga menjadi pendorong utama untuk belajar. Seperti Kriszen Kagoho dari PKBM Hadasah mengaku bahwa dirinya ingin sekolah karena ingin mengambil SUKMA agar bisa melanjutkan ke paket C dan mencalonkan diri menjadi kepala desa dan jika mampu dia ingin melamar jadi PNS di kampungnya.

Satu hal yang menarik dari bantuan keaksaraan dasar yang diberikan di Papua adalah meskipun bantuan keaksaraan dasar saat ini sudah tidak diberikan di tempat yang sama (karena program dari Ditbindiktara berakhir pada 2017), pendidikan keaksaraan dasar di tahun 2018 (kunjungan riset bulan juli 2018) masih berlangsung dan di hadiri oleh sejumlah warga belajar. Warga belajar juga tampak sangat antusias. Meskipun bantuan sudah berlalu satu tahun yang lalu, yayasan masih aktif memberikan layanan pendidikan keaksaraan lanjutan pada sejumlah warga belajar di sana. Melihat fenomena PKBM Hadasah dan Longgalo, tampaknya dengan atau tanpa adanya bantuan dana operasional akan terus berlangsung karena komitmen yang kuat dari gereja dan antusiasme warga belajar untuk bisa segera mampu memberikan layanan kepada umat dalam rangka membantu gereja di komunitasnya.

Catatan lainnya, implementasi kebijakan pendidikan di Papua tampaknya masih mengalami kendala yang serius. Dengan kondisi masyarakatnya yang rentan konflik, maka pola pemberian bantuan tidak dapat dibuat menggunakan skema yang sama seperti di provinsi lain. Kecemburuan antar-masyarakat dapat menimbulkan permasalahan baru sehingga pola pemberian bantuan biasanya akan dikelola oleh dinas. Akibatnya, selain program tidak terlaksana dengan optimal, peluang penyelewengan program akan semakin besar. Dengan melihat PKBM yang ada di Papua yang sebagian besar dimotori oleh gereja terbukti bahwa dengan ataupun tanpa bantuan dari pemerintah, PKBM di Papua dapat terus berlangsung. Untuk itu, jika ingin meningkatkan hasil

capaian pendidikan di Papua, kerja sama melalui gereja tampaknya merupakan alternatif yang baik.

B. Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam rangka mengentaskan buta aksara di Suku Bajo, di Kepulauan Konawe telah didirikan banyak PKBM. Sayangnya tidak semua PKBM memiliki kredibilitas dan program yang serius terhadap pengentasan buta aksara. Sebagian besar malah hanya muncul ketika ada program bantuan. Dalam upaya menjaga kualitas pengentasan buta aksara di Konawe Kepulauan, dinas pendidikan di kabupaten tersebut tidak lantas menunjuk secara random PKBM-PKBM tersebut, tetapi terlebih dahulu diumumkan baru kemudian diobservasi. Observasi dilakukan tidak hanya melalui dokumen tetapi juga mendatangi langsung ke lokasi PKBM tersebut dan disandingkan dengan sejumlah dokumentasi baik berupa foto maupun video yang menerangkan tentang aktivitas PKBM selama berdirinya PKBM tersebut. Dari hasil observasi yang dilakukan dinas pada 2016, PKBM yang terpilih menyelenggarakan Program KD-KAT adalah PKBM Madani.

Mengenai Program KD-KAT ini sebetulnya PKBM Madani mengetahui melalui *whatsapp group* PKBM seluruh Indonesia. Kemudian, baru program tersebut disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan dan selanjutnya setelah terpilih, menjalankan program dengan didampingi oleh Dinas Kabupaten Konawe Kepulauan. Dilihat secara administratif, PKBM Madani merupakan PKBM yang paling siap menyelenggarakan pendidikan keaksaraan di Konawe Kepulauan. PKBM ini dimiliki oleh pengelola dengan latar belakang pendidikan luar sekolah sehingga seleksi warga belajar juga

memiliki *quality control* yang baik. Pengelola bersama dengan dinas pendidikan dan juga tenaga pengajar secara intensif mendatangi rumah-rumah di wilayah Konawe Kepulauan dan diuji untuk membaca dan menulis kalimat sederhana yang juga didampingi oleh kepala desa di Konawe Kepulauan. Setelah seleksi dilakukan, warga belajar yang terpilih boleh mengikuti program KD-KAT oleh PKBM Madani.

Pengelola PKBM mengaku tidak ingin salah sasaran karena tujuan program ini benar-benar ingin mengentaskan buta aksara. Untuk perekrutan guru, pengelola PKBM merekrut guru sekolah dasar di kelas rendah dan juga beberapa warga asli Bajo yang dianggap sudah bisa membaca dan menulis agar dapat menerjemahkan materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini dianggap perlu dilakukan karena bahasa pengantar selama proses pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia, sementara warga belajar sebagian besar masih menggunakan bahasa lokal (bahasa Bajo). Selain itu, kesulitan mencari guru yang dapat mengajar dan mengerti bahasa lokal juga menjadi pertimbangan untuk merekrut warga asli suku Bajo dalam membantu menerjemahkan materi setiap pelajaran dalam program keaksaraan.

Jumlah warga belajar yang dikelola oleh PKBM Madani pada saat program berlangsung berjumlah 100 orang atau sesuai dengan target sasaran program belajar dalam juknis. Warga belajar dibagi menjadi 10 kelompok belajar masing-masing 10 warga belajar. Biasanya tiap-tiap warga belajar memiliki satu orang ketua kelompok belajar yang dipercayai oleh seluruh anggota untuk mendukung proses pembelajaran. Salah satu dukungan ketua kelompok belajar adalah menyediakan tempat belajar saat program

berlangsung. Biasanya mereka secara sukarela menyediakan sebagian ruang di rumahnya untuk tempat belajar. Namun sebagian lainnya tempat belajar juga dilakukan di sekretariat PKBM.

Selama proses belajar, masing-masing kelompok berjumlah 2 orang akan didampingi oleh 2 orang tutor/tendik. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dua orang tutor ini memiliki fungsi yang berbeda – satu orang yang menguasai materi untuk mengajar keaksaraan, lainnya menjadi penerjemah yang berasal dari suku Bajo. Untuk memudahkan proses belajar, biasanya tempat tinggal tutor dan warga belajar relatif berdekatan, sehingga proses pembelajaran hampir tidak menemui kendala yang berarti.

Dalam memberikan pembelajaran keaksaraan dasar, PKBM Madani membuat bahan ajarnya sendiri. Sumber bahan ajar biasanya berasal dari internet dengan mengunduh silabus yang telah disediakan oleh direktorat, namun beberapa ada juga yang mengadopsi buku-buku pelajaran di sekolah dasar, khususnya buku pada kelas rendah atau membuat bahan ajar sendiri dengan kreatif, yaitu menggunakan alat bantu di sekitar rumah warga belajar, seperti kulit kerang, siput, dan lain-lain.

Untuk menarik minat warga belajar, pengelola tidak memberikan makanan pada warga belajar, kecuali pemberian sembako sewaktu lebaran (hanya satu kali). Hal ini memang sedikit berbeda dengan beberapa lokasi lainnya yang biasanya menggunakan makanan pokok untuk menarik warga belajar untuk datang belajar. Di Konawe Kepulauan, khususnya warga perempuan, justru memiliki antusiasme yang tinggi untuk bisa

membaca. Beberapa di antaranya memilih alasan agar dapat membaca pesan dalam gawai yang dikirim oleh anaknya yang sedang merantau di pulau seberang, beberapa lainnya justru memiliki motivasi agar dapat berbelanja kebutuhan sendiri, seperti ke pasar atau untuk sekadar menjual ikan.

Untuk menjaga motivasi para warga belajar, pengelola dan tutor menyiapkan beberapa strategi, salah satunya dengan membuat absen setiap kali pertemuan dan memberikan hukuman bagi yang tidak hadir. Hukuman biasanya merupakan sanksi ringan berupa bernyanyi dan berjoget. Kegiatan belajar yang menyenangkan ini tampaknya cukup diminati oleh sejumlah warga belajar sehingga tingkat kehadiran di PKBM ini juga cukup tinggi. Untuk membuktikan program tersebut berjalan lancar, PKBM Madani mendokumentasikan setiap kegiatan belajar mengajar dan biasanya akan ditonton bersama sebagai hiburan di sela-sela pembelajaran.

Video dan foto selain membantu proses belajar juga membantu proses *monitoring* yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan. Selama masa program (atau sekitar 6 bulan) *monitoring* dilakukan dengan melihat bukti dokumentasi ditambah dengan wawancara langsung pada masyarakat setempat. Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan mengaku bahwa program KD KAT yang sudah dijalankan oleh PKBM Madani dapat dikatakan berhasil. Kesuksesan PKBM Madani ini juga terbukti dari hasil capaian perolehan SUKMA di akhir program. Dari 100 orang warga belajar, hanya 10 orang yang tidak lulus dan belum mendapat SUKMA, 90

warga belajar lainnya sudah dianggap lancar membaca dan menulis kalimat sederhana dan sudah memiliki SUKMA.

Dari hasil evaluasi setelah dilakukan program, saat ini penduduk buta aksara di Konawe Kepulauan masih berjumlah sekitar 300 orang, atau masih ada 2,3% penduduk yang memerlukan perhatian pemerintah untuk memberantas buta aksara. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan berharap ke depannya kabupaten ini menerima program lanjutan dari pemerintah pusat. Hal itu karena dimensi keaksaraan dasar tidak berhenti pada proses "*learning*", tetapi harus dilanjutkan pada "proses produktivitas".

C. Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

Program Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KD-KAT) pada 2017 merupakan salah satu bentuk bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal PAUD-DIKMAS, Direktorat Kesetaraan dan Keaksaraan kepada PKBM untuk mengurangi buta aksara pada komunitas adat di berbagai daerah di Indonesia. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan suatu wadah di mana seluruh kegiatan belajar masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dikelola dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat. Dalam konteks ini, PKBM dapat menjadi pendidikan alternatif bagi masyarakat terpencil yang belum memiliki sekolah formal.

Ditbindiktara selaku unit pelaksana menyerahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk mengidentifikasi PKBM yang tepat guna melaksanakan program

bantuan tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan kemudian mengundang PKBM Wijaya Kusuma -karena berada di wilayah pemukiman komunitas adat Tengger, untuk mengikuti program KD-KAT dan menyarankan untuk mengajukan proposal.

PKBM Wijaya Kusuma berdiri pada 2010 dan sudah mendapatkan izin operasional, kemudian pada 2013 sudah mendapatkan SK Menkumham. PKBM Wijaya Kusuma terlibat dalam program KD-KAT melalui proses selektif dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menindaklanjuti proposal yang sudah dibuat untuk dikirim kepada Ditbindiktara.

Di sisi lain, Bu Lilik Wijayanti selaku Ketua PKBM dan beberapa tenaga pengajarnya, turun ke beberapa desa di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. PKBM Wijaya Kusuma berhasil mengidentifikasi dan melakukan sosialisasi tentang keberadaan program KD-KAT di delapan desa. Proposal PKBM Wijaya Kusuma menjadi salah satu yang lolos untuk mendapatkan bantuan program KD-KAT. Setelah dilakukan akad kerja sama, dana bantuan langsung masuk ke rekening PKBM Wijaya Kusuma tanpa melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Bersama dengan bantuan perangkat desa dan ibu-ibu PKK, PKBM Wijaya Kusuma mulai melaksanakan program KD-KAT. Sedangkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan bertugas melakukan *monitoring* bersama Forum PKBM (FPKBM) selama program berjalan.

PKBM Wijaya Kusuma merupakan satu-satunya PKBM yang mendapatkan program KD-KAT di Kabupaten Pasuruan. Di Jawa

Timur, untuk program KD-KAT hanya diberikan kepada masyarakat adat Tengger di lereng Gunung Bromo dan Osing yang berada di Banyuwangi. Warga belajar dengan rentang usia 15-19 tahun yang menjadi peserta program KD-KAT merupakan hasil identifikasi yang dilakukan oleh kepala desa dengan pengelola PKBM. Kepala desa mengundang warga belajar yang terpilih dan meminta komitmen mereka untuk mengikuti program PKBM. Umumnya, masyarakat akan patuh terhadap perintah kepala desa, sehingga program ini dapat berjalan baik. Program KD-KAT diselenggarakan di Desa Podokoyo, Kecamatan Tosari, yang kemudian disebar menjadi tiga titik, yaitu: Dusun Podokoyo, Dusun Jetak, dan Dusun Sunogiri.

Secara administratif, wilayah Desa Podokoyo yang terdiri dari empat dusun ini dipisahkan oleh desa lain, yaitu Desa Tosari. Dusun Podokoyo dan Dusun Ngawu terletak terpisah dengan Dusun Jetak dan Dusun Sunogiri. Program KD-KAT hanya menjangkau tiga dusun, sedangkan Dusun Ngawu belum terjangkau program ini. Hal ini karena dusun tersebut letak wilayahnya paling jauh, dekat dengan wilayah Gunung Bromo, sehingga menyulitkan akses para tutor. Jumlah warga dusun Ngawu hanya satu RT, sekitar 44 kepala keluarga. Secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Podokoyo sekitar 2.000 jiwa lebih. Dari jumlah itu, yang terlibat dalam program KD-KAT adalah 100 orang sesuai dengan ketentuan program tersebut.

Dalam proses pembelajaran, program KD-KAT tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Pada bulan Agustus hingga Desember yang merupakan musim hujan, sehingga membuat cuaca sangat dingin. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga

belajar tidak bisa datang ke tempat pembelajaran, apalagi tempat tinggal beberapa warga belajar cukup jauh dari lokasi belajar. Selain itu, masyarakat adat Tengger juga masih kental dengan adat-istiadatnya, seperti upacara adat desa, *unan-unan*, *karo*, dan hajatan atau selamatan lainnya yang digelar baik oleh pribadi maupun bersama-sama satu desa. Apabila akan menyelenggarakan hajatan semacam itu, maka fokus masyarakat termasuk warga belajar tertuju pada acara tersebut. Istilahnya, kalau sudah ada yang punya “*gawe*”, tidak dapat diganggu oleh pelajaran. Jadi pihak PKBM yang mengalah. Biasanya “*gawe*” berlangsung selama satu minggu, jadi dapat dikatakan cukup lama.

Tanggapan ketua adat terhadap program KD-KAT sangat mendukung, bahkan ada beberapa tokoh adat yang menjadi warga belajar. Keterlibatan tokoh adat mampu menjadi panutan bagi masyarakat dan mendorong mereka untuk terlibat dalam program KD-KAT. Kepala desa dan beberapa perangkat desa juga merupakan alumni PKBM yang mengikuti program kesetaraan. Hal tersebut karena syarat untuk menjadi perangkat desa, kepala desa, anggota KPPS, dan lainnya harus lulus kejar paket A. Bahkan yang masih belum lulus meminta surat keterangan aktif sebagai peserta warga belajar untuk keperluan mendaftar sebagai perangkat desa dan kebutuhan lainnya. Artinya bagi masyarakat adat Tengger, kehadiran PKBM Wijaya Kusuma sangat membantu kepentingan mereka.

Di masyarakat adat Tengger, dikenal istilah *paruman dukun*, yaitu himpunan para dukun. Dukun di masyarakat adat Tengger bukan untuk mengobati seperti di tempat lain, melainkan tokoh yang disakralkan untuk memimpin upacara adat. Masyarakat adat

Tengger terbagi ke dalam dua komunitas, yaitu *Brang Wetan* (*bagian timur*) dan *Brang Kulon* (*bagian barat*). Jika ada upacara adat, baik *Brang Wetan* maupun *Brang Kulon* sama-sama mengikuti upacara tersebut. Lokasi PKBM Wijaya Kusuma berada di *Brang Kulon*.

Dalam proses pembelajaran, tenaga pengajar PKBM Wijaya Kusuma menggunakan “dua bahasa”, jadi campuran. Pendekatannya menggunakan bahasa Tengger dengan *kromo inggil* supaya sopan karena warga belajar umumnya sudah usia lanjut. Selain bahasa Tengger, juga digunakan bahasa Indonesia, dengan tujuan sekaligus mengajarkan warga belajar tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain masyarakat asli Tengger, terdapat juga pendatang atau orang luar yang ikut kegiatan pembelajaran di PKBM. Mereka adalah orang luar yang mendapatkan jodoh dari masyarakat Tengger atau pekerja yang buta aksara.

Buku dan alat-alat pembelajaran diperoleh PKBM Wijaya Kusuma dari beberapa lembaga. Buku panduan pelaksanaan program KD-KAT didapat dari Ditbindiktara. Buku panduan ini diperbanyak untuk dibagikan kepada para tenaga pengajar sebagai bahan pegangan untuk mengajar. PKBM Wijaya Kusuma juga mendapat bahan ajar seperti *Batung Bingar* (Baca-Hitung, Bicara-Dengar) yang dikembangkan oleh BPPAUDNI Regional II Surabaya, di mana satu warga belajar mendapatkan satu buku *Batung Bingar*.

Selain itu, ada juga buku yang dibuat oleh PKBM Wijaya Kusuma, seperti buku cerita asal usul Tengger dengan

menggunakan bahasa Tengger, ada pula yang berbahasa Inggris. PKBM Wijaya Kusuma dalam membuat buku tersebut didukung oleh tenaga pengajar yang memang berasal dari masyarakat Tengger. PKBM Wijaya Kusuma menggunakan buku itu untuk melengkapi pembelajaran kepada warga belajar. Dalam mengajarkan berhitung, tenaga pengajar juga menggunakan bahasa hitung dalam bahasa Tengger, sedangkan dalam pengembangan praktik membaca, dapat membaca teks pendek yang berisi cerita asal-usul kisah rakyat di Tengger. PKBM Wijaya Kusuma juga membuat RPP yang dikembangkan dari buku *Batung Bingar*.

1. Pengajar PKBM Wijaya Kusuma

Program Pendidikan KD-KAT yang diselenggarakan PKBM Wijaya Kusuma melibatkan beberapa tenaga pengajar yang telah berpengalaman dalam dunia pendidikan. Minimal mereka menghabiskan waktu selama 5 tahun dalam pembelajaran keaksaraan dasar. Berikut adalah beberapa tenaga pengajar yang menjadi informan penelitian ini:

Tabel 3.1. Pengalaman Mengajar Tutor PKBM Wijaya Kusuma

No.	Nama	Pengalaman Mengajar	Tingkat
1	Ernawati	10 tahun	TK
2	Anissa	5 tahun	SMA
3	Helli	5 tahun	TK
4	Suswati	19 tahun	TK
5	Titi	10 tahun	SD
6	Setia	10 tahun	SD

Sumber: Diolah dari data PKBM Wijaya Kusuma, 2018.

Pengalaman para tenaga pengajar ini juga didukung dengan pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti, di mana rata-rata mereka

mengikuti pelatihan sebanyak 1-5 kali. Pelatihan yang mereka ikuti terkait dengan metode mengajar, keaksaraan mengajar, wirausaha, dan lain-lain. Kualitas tenaga pengajar di PKBM Wijaya Kusuma memang cukup baik dari segi pendidikan dan pengalaman. Kualitas tenaga pengajar yang baik tampak jelas mendukung dalam target pencapaian program pendidikan KD-KAT, terutama dalam tingkat keberhasilan penguasaan keaksaraan dasar di antara para warga belajar.

Para tenaga pengajar ini memiliki komitmen yang besar terhadap pendidikan di tempat mereka mengajar. Berdasarkan pengalaman dan pelatihan yang sudah dilalui, dapat dikatakan PKBM Wijaya Kusuma cukup selektif dalam menunjuk tenaga pengajar untuk terlibat dalam program KD-KAT ini. Ketua PKBM, Ibu Lilik, yang langsung menghubungi mereka untuk meminta kesediaan menjadi tenaga pengajar.

Melalui PKBM Wijaya Kusuma, para tenaga pengajar berkomitmen untuk membantu proses pengentasan buta aksara di masyarakat. Program pendidikan KD-KAT yang diperoleh PKBM Wijaya Kusuma, turut membantu operasional pelaksanaan belajar mengajar di masyarakat dalam struktur yang lebih kecil, yaitu komunitas adat. PKBM Wijaya Kusuma yang berdiri di lereng Gunung Bromo, di mana terdapat masyarakat adat Tengger memang memiliki peran penting dalam membantu pengentasan buta aksara. Dukungan dan komitmen dari tenaga pengajar yang berkualitas tentunya dapat mempercepat pengentasan tersebut. Berikut ini adalah alasan mengapa tenaga pengajar bersedia mendukung program KD-KAT bagi masyarakat adat Tengger.

Tabel 3.2. Motivasi Tutor PKBM Wijaya Kusuma

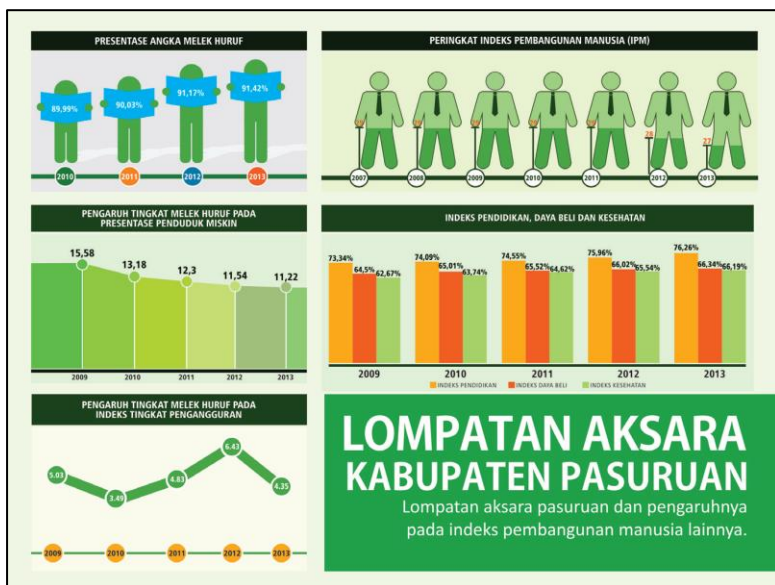
No.	Nama	Motivasi sebagai Pengajar Program KD-KAT
1	Ernawati	Membantu proses pengentasan buta aksara berarti membantu orang tua yang memiliki anak (misalnya tingkat TK), sehingga orang tua bisa paham, paling tidak mereka dapat mengarahkan putra-putrinya dalam belajar.
2	Anissa	Ingin memberikan ilmu yang selama ini diperoleh, sehingga dapat berperan dalam pemberantasan buta aksara masyarakat sekitar.
3	Helli	Dapat memberikan pengalaman baru bagi warga belajar yang tidak dapat membaca dan menulis, misalnya membuat mereka bisa menulis tanda tangan karena sebelumnya masih menggunakan cap jempol.
4	Suswati	Untuk membuat warga belajar mengenal huruf, banyak juga yang sudah mengenal angka, namun dengan program KD-KAT mereka semakin termotivasi untuk lebih bisa membaca, berhitung, dan mewujudkan cita-cita pemerintah.
5	Titi	Berbagi pengalaman, tampil berani, bersosialisasi.
6	Setia	Dapat lebih berperan berpartisipasi menuntaskan buta aksara, berharap ke depan, masyarakat di sini dapat berinteraksi dengan warga lain agar tidak minder dan memiliki keberanian.

Sumber: Diolah dari data PKBM Wijaya Kusuma, 2018.

Komitmen para tenaga pengajar program KD-KAT di masyarakat adat Tengger tidak mengganggu aktivitas utama mereka sebagai tenaga pendidik di sekolah formal, karena mereka sudah menentukan jadwal kegiatan belajar mengajar bersama masyarakat.

2. Bahan Ajar

Sebelum memulai proses pembelajaran dalam program KD-KAT, tenaga pengajar menyiapkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu. Bahan atau modul pembelajaran sudah disiapkan oleh lembaga PKBM Wijaya Kusuma, dan para tenaga pengajar kemudian mengembangkannya. Beberapa modul yang disiapkan dan dikembangkan antara lain: Baca Tulis Hitung Bicara Mendengar (*Batung Bingar*), alat peraga, dan modul keaksaraan usaha mandiri (untuk keaksaraan lanjutan).



Gambar 3.1. Lompatan Aksara Kabupaten Pasuruan

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan

Baca Tulis Hitung Bicara Mendengar (*Batung Bingar*), merupakan bahan ajar yang berperan dalam meningkatkan angka

melek huruf di Kabupaten Pasuruan. Pada 2011, BPPAUDNI Regional II Surabaya di Kabupaten Pasuruan melaksanakan uji coba model *Batung Bingar*. Setelah uji coba, tahun 2012, Kabupaten Pasuruan menggandakan bahan ajar *Batung Bingar* sebanyak 2000 paket. Bahan ajar inilah yang kemudian digunakan para tenaga pengajar (tutor) secara mandiri tanpa mengikuti pelatihan khusus. Kondisi ini terjadi karena para tutor yang mayoritas guru PAUD dan SD merasa mudah menggunakan bahan ajar tersebut.

Salah satu kelebihan model ini adalah percepatan waktu yang diperlukan peserta didik untuk dapat membaca, menulis, dan berhitung. Tutor, penyelenggara program, dan peserta didik dapat memilih kecepatan belajar yang diinginkan. Waktu tercepat untuk menyelesaikan keaksaraan dasar model *Batung Bingar* adalah 48 jam dalam 12 hari belajar intensif. Untuk Kabupaten Pasuruan dipilih pola 114 jam selama tiga bulan. Hasil belajar untuk pola 48 jam maupun pola 114 jam tidak berbeda. Dari lapangan diketahui tingkat melek aksara peserta didik dengan metode ini mencapai kisaran 70-80%. Tidak ada pemaksaan ketuntasan 100% seperti yang terjadi selama ini (Mediksi, 2014).

Selain bahan ajar, lembaga PKBM Wijaya Kusuma juga memiliki pedoman pembelajaran/penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar, yang disesuaikan dengan buku petunjuk teknis program KD-KAT oleh Kemendikbud. Materi yang diajarkan oleh para tenaga pengajar disesuaikan dengan kehidupan peserta didik, yaitu masyarakat adat Tengger. Misalnya memberikan informasi tentang sejarah Tengger, kehidupan sehari-hari seperti bertani, atau sebelum pelajaran dimulai para tenaga pengajar dengan warga

belajar bersama-sama mengolah makanan tradisional khas masyarakat Tengger.

Bentuk bahan ajar yang digunakan dapat berupa cetakan, audio/video, dan alat peraga. Media dukung ajar dapat berupa alat tulis, papan tulis, dan lainnya. Sumber bahan ajar tidak disusun oleh tenaga pengajar sendiri, namun bersama-sama dengan lembaga (PKBM Wijaya Kusuma) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Metode pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pengajar PKBM Wijaya Kusuma selama pelaksanaan program KD-KAT cukup bervariasi, dari tanya jawab, diskusi, menyanyi, bermain, praktik memasak, hingga bercerita.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa terjadi kesepakatan antara tenaga pengajar dengan warga belajar terkait dengan jadwal belajar. Setiap dua orang tenaga pengajar bertanggung jawab terhadap sepuluh orang warga belajar. Terkait lokasi pelaksanaan pembelajaran, dapat berbeda-beda antara tenaga pengajar yang satu dengan yang lain, misalnya di rumah salah satu warga belajar karena dianggap lebih nyaman atau dapat juga dilakukan di balai dusun. Semua tergantung juga dengan kesepakatan antara tenaga pengajar dan warga belajar.

Partisipasi warga belajar dalam program KD-KAT cukup besar, mereka antusias mengikuti pembelajaran, hal ini terlihat dari jumlah kehadiran yang memenuhi target 80%. Kendala warga belajar tidak dapat hadir biasanya karena cuaca yang tidak mendukung atau ada kegiatan keagamaan/adat. Mayoritas warga belajar yang mengikuti program ini adalah perempuan, karena

memiliki waktu yang lebih longgar, berbeda dengan para lelaki yang harus bekerja.

3. Penilaian Hasil Belajar

Para tenaga pengajar menyusun instrumen penilaian perkembangan kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Selain itu, mereka juga membuat laporan perkembangan kemajuan pembelajaran peserta didik. Komitmen tenaga pengajar untuk memberikan pengajaran yang maksimal dan antusiasme warga belajar terlihat dari keberhasilan warga belajar yang memperoleh SUKMA hingga 100%.

Dari rata-rata warga belajar yang mengikuti program KD-KAT, hampir 80% di tiap-tiap kelompok telah memiliki kecakapan baca, tulis, dan hitung. Presentase ini berdasarkan pengamatan dari para tenaga pengajar, di mana setiap dua orang tenaga pengajar bertanggung jawab terhadap sepuluh warga belajar. Berikut adalah pengakuan para tenaga pengajar terkait tingkat kecakapan baca, tulis, dan hitung warga belajar.

Tabel 3.3. Kemampuan Literasi Calistung Warga Belajar

No.	Nama	Lancar	Kurang Lancar	Belum Bisa
1	Ernawati	7 orang	3 orang	-
2	Helli	7 orang	3 orang	-
3	Suswati	8 orang	2 orang	-
5	Titi	8 orang	2 orang	-
6	Setia	8 orang	2 orang	-

Sumber: Hasil Wawancara Tim Peneliti, 2018.

Warga belajar yang melanjutkan ke program keaksaraan lanjutan berjumlah 100%, namun belum ada yang melanjutkan ke program kesetaraan (Paket A). Manfaat yang diperoleh warga

belajar setelah mendapatkan kecakapan baca, tulis, dan hitung cukup beragam dan terkait dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya, dengan mengikuti program KD-KAT, warga belajar jadi bisa memiliki tanda tangan dan mampu membaca mata uang. Warga belajar menjadi lebih percaya diri, karena mereka tidak mudah dimanfaatkan orang lain. Dari berbagai manfaat yang disampaikan oleh warga belajar, ada satu manfaat yang sebetulnya berdampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda masyarakat adat Tenggeng, yaitu bahwa warga belajar yang mengikuti program KD-KAT dapat memberikan motivasi kepada anak cucu mereka untuk lebih semangat belajar. Bahkan terdapat warga belajar yang berani untuk mengajarkan calistung kepada warga belajar yang lain, walaupun masih dalam lingkup kelompok belajar mereka sendiri.

Sempat disinggung sebelumnya, bahwa tidak mudah menjadi tenaga pengajar bagi lingkungan masyarakat adat yang kadang memiliki akses lokasi yang sulit untuk dijangkau. Faktor cuaca juga sangat memengaruhi proses pembelajaran, karena sebagian warga belajar tidak hadir ketika cuaca kurang mendukung. Upacara adat dan hajatan juga memengaruhi tingkat kehadiran warga belajar. Warga belajar memang membutuhkan pembelajaran yang mengasyikkan, bahwa ketika waktu pembelajaran agak lama, banyak warga belajar yang mengeluh, biasanya mereka mencari alasan untuk pulang, misalnya harus bekerja. Pekerjaan juga menjadi hambatan lain, dalam arti beragamnya jam bekerja warga belajar menghadirkan kesulitan tersendiri dalam menentukan jadwal pembelajaran.

Namun, para tenaga pengajar memiliki strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Di antaranya mengganti hari pembelajaran karena pembatalan akibat cuaca atau aktivitas masyarakat. Para tenaga pengajar tidak jemu memberikan motivasi kepada warga belajar yang terlihat semakin menurun semangatnya. Prinsip para tenaga pengajar adalah mengikuti kemauan para warga belajar terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam panduan program KD-KAT. Para tenaga pengajar memberikan berbagai saran untuk perbaikan program KD-KAT ke depannya, yang dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.4. Masukan dan Saran Warga Belajar

No.	Nama	Masukan dan Saran
1	Ernawati	Perlu ada kelanjutan dari program KD-KAT.
2	Anissa	Penambahan modul pembelajaran. Selama ini digunakan model <i>Batung Bingar</i> .
3	Helli	Perlu tempat belajar sendiri, karena kalau menumpang di rumah warga atau balai dusun menjadi tidak kondusif.
4	Suswati	Perlu dukungan kebutuhan kursi dan meja untuk proses pembelajaran, karena orang tua banyak yang mengeluh jika duduk di lantai.
5	Titi	Kelengkapan sarana dan prasarana dalam Program KD-KAT ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat.
6	Setia	Perlu dikembangkan model pembelajaran yang tidak membosankan.

Sumber: Hasil Wawancara Tim Peneliti, 2018.

Ketua Lembaga PKBM Wijaya Kusuma, Lilik, juga menyarankan adanya tempat belajar khusus dan kelengkapan fasilitas pembelajaran. Selama ini, pihak PKBM yang

mengusahakan sendiri penyediaan modul dan alat belajar. Kendala yang hadir saat melakukan proses pembelajaran di balai dusun adalah jadwal yang berbarengan dengan acara aparat desa, sehingga mau tidak mau pihak PKBM harus mengalah. Bukan hanya di program keaksaraan saja, namun juga di program kesetaraan, pihak PKBM kerepotan ketika akan melaksanakan ujian nasional, apalagi saat ini telah menggunakan UNBK. PKBM tidak memiliki fasilitas, sehingga untuk keperluan ujian meminjam fasilitas dari SMA, termasuk tenaga ahli untuk mempersiapkan ujian tersebut.

4. Motivasi Warga Belajar

Semua warga belajar yang mengikuti program KD-KAT belum pernah mengikuti pendidikan formal sebelumnya. Faktor ekonomi, akses jalan, dan nikah muda, menyebabkan mereka tidak mengikuti pendidikan formal. Namun, keinginan untuk belajar walaupun sudah tidak muda lagi masih ada. Dapat terlihat dari motivasi mereka mengikuti program KD-KAT. Berikut motivasi dan tujuan utama warga belajar (informan) dalam mengikuti program KD-KAT:

Tabel 3.5. Motivasi dan Tujuan Warga Belajar

No.	Nama	Motivasi dan Tujuan
1	Endang	Supaya bisa berhitung dan membaca, kalau cukup umur bisa untuk bekerja, kalau tidak untuk sekadar pengalaman
2	Sukartinah	Supaya bisa membaca, pengalaman, untuk memotivasi
3	Bambang	Supaya bisa membaca, memotivasi, bisa ikut menjadi aparat desa

Sumber: Hasil Wawancara Tim Peneliti, 2018.

Para warga belajar mengetahui adanya program KD-KAT dari sosialisasi PKBM Wijaya Kusuma. Mereka dikumpulkan di balai dusun oleh PKBM bersama dengan aparat desa. Para warga belajar mengikuti pembelajaran dalam program KD-KAT sebanyak tiga kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Jika cuaca kurang mendukung atau ada kegiatan adat, jadwal dipindah sesuai kesekapatan antara warga belajar dengan tenaga pengajar. Keluarga atau masyarakat di sekitar warga belajar, mendukung para warga belajar untuk mengikuti program KD-KAT. Bahkan, ada juga yang ikut melihat proses pembelajaran. Banyak dari masyarakat yang ingin mengikuti program KD-KAT, namun terkendala dengan jumlah kuota yang sudah ditentukan.

Selama proses pembelajaran, para warga belajar cukup memahami materi yang diberikan tenaga pengajar, karena memang para tenaga pengajar menggunakan bahasa daerah yang dikombinasikan dengan bahasa Indonesia. Sedangkan kendala yang hadir selama proses belajar, misalnya terdapat warga belajar yang harus mengikuti kegiatan adat atau acara keluarga. Namun demikian, para warga belajar, berharap program KD-KAT tetap berlanjut karena banyak manfaat yang didapatkan oleh mereka. Sayangnya, program KD-KAT yang diberikan satu kali untuk satu komunitas, sementara solusi menggunakan bantuan pemerintah daerah pun tergantung dengan perencanaan APBD. Sedangkan, dana desa biasanya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan penyediaan air bersih.

D. Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi

Di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, pelaksanaan program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil

dilaksanakan oleh beberapa PKBM. Berikut adalah deskripsi pelaksanaan program di masing-masing PKBM.

1. PKBM Berkah

PKBM Berkah berada di Jl. Jati RT 19 Sei Batu, Desa Alur Gading Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. PKBM ini resmi berdiri pada tahun 2014. Awalnya PKBM ini hanya mengurus pendidikan kesetaraan atau paket A, B, dan C. Namun pada 2016 PKBM ini membuka program keaksaraan dasar bagi komunitas adat terpencil. Tidak mudah untuk memasuki lingkungan baru bagi PKBM ini. Terlebih lagi, jauh sebelum hari ini bagi masyarakat Rimba pendidikan (baca: membaca dan menulis) adalah hal yang dianggap tabu. Oleh karena itu, memasuki komunitas suku Anak Dalam (SAD) dengan membawa misi pendidikan juga tidak mudah.

Di awal program, PKBM Berkah melakukan asesmen terlebih dahulu melalui Jenang agar mudah dipercaya. Pendekatan berlangsung selama 2 minggu dengan komunikasi intens hampir setiap hari. Jenang sendiri adalah perantara bagi orang SAD dan orang luar. Di kalangan orang SAD, terdapat dua kepemimpinan yang mereka hormati, yaitu Jenang kedua Temenggung. Keduanya dibedakan dari asal mereka. Temenggung adalah pemimpin dari keturunan asli SAD yang jelas memiliki adat, kepercayaan, dan kebiasaan yang sama, sedangkan Jenang sebaliknya merupakan orang luar yang memiliki adat, kebiasaan, dan kepercayaan yang berbeda namun dipercaya sepenuhnya oleh SAD karena telah teruji bertahun-tahun setia membela suku SAD. Untuk itu, Jenang adalah jembatan bagi pemerintah dan suku SAD untuk

mengomunikasikan hal-hal yang terkait dengan SAD. Termasuk program KD-KAT di desa Sukajadi, Sarolangun.

Dalam setiap aktivitasnya, PKBM Berkah selalu mengajak Jenang. Jenang Mustafa namanya. Meskipun lulusan SD, Jenang Mustafa memiliki kecerdasan bahasa daerah luar biasa. Jenang Mustafa tidak hanya menguasai bahasa Rimba tetapi juga beberapa bahasa seperti bahasa Sunda, Jawa, dan Batak. Penguasaan bahasa itu jugalah yang memudahkan Jenang Mustafa mengutarakan setiap maksud dari PKBM Berkah. Bahkan, Jenang Mustafa menjadi tutor dalam program ini. Lokasi kerja Jenang Mustafa ada dua, pertama di Sungai Surian, Desa Kulau lintang dan lokasi lainnya adalah di Desa Sukajadi. Tapi secara pengalaman, meskipun tidak tamat S1 Keguruan, Jenang Mustafa berpengalaman mengajar sejak tahun 1985.

Untuk keaksaraan dasar sendiri, Jenang Mustafa sudah mengajar sejak 2010 dengan biaya sendiri. Motivasi pertama dari Jenang Mustafa adalah memberikan pelajaran bagi SAD agar bisa membaca dan menulis serta melindungi SAD agar tidak tertipu para pengumpul karet. Menurut warga setempat, SAD adalah ladang empuk untuk dibohongi saat menimbang karet. Hal itu karena sebagian dari mereka tidak memahami angka dan cara berhitung.

Dalam memberikan layanan pendidikan, PKBM Berkah menyediakan silabus dan RPP sendiri. Silabus biasanya diunduh dari *website* direktorat PAUD-DIKMAS. Program ini berhasil memberikan layanan pendidikan bagi 34 orang asli SAD, 29 orang di antaranya sudah mendapat SUKMA, dan sisanya masih harus

diproses oleh dinas pendidikan setempat. Dalam mengikuti program ini, warga sangat antusias, terbukti dari kehadiran yang dijadwalkan satu minggu tiga kali (Jumat, Sabtu, Minggu) setiap pertemuan belajar setidaknya dihadiri oleh 75% warga belajar. Sisanya tidak dapat hadir karena harus mengumpulkan getah karet atau berburu untuk menyambung nafkah hidup.

Dalam pelaksanaannya, program ini dibagi menjadi 2 kelompok karena warga belajar perempuan dan laki-laki harus dipisahkan. Proses belajar untuk laki-laki dilakukan pada pukul 12.00-14.00, sedangkan perempuan belajar pukul 14.00-16.00. Pembelajaran di SAD memang harus terpisah karena aturan adat tidak mengizinkan laki-laki dan perempuan bisa berinteraksi langsung. Hal ini dikarenakan perempuan bagi SAD adalah orang yang harus dijaga dan dilindungi.

Selama pelaksanaan program, PKBM Berkah sebelumnya belum memiliki bangunan permanen, sehingga pembelajaran biasanya dilakukan di bawah pohon. Tidak ada keluhan mengenai tempat belajar tersebut. Bahkan menurut salah satu tutornya, warga belajar lebih menyukai belajar di bawah pohon karena udara yang lebih segar dan tidak merasa kepanasan. Materi yang diajarkan yaitu membaca, menulis, dan berhitung tingkat dasar. Selain itu, karena ini warga belajar juga merupakan SAD yang telah dimukimkan, maka materi pembelajaran juga disisipi dengan materi kebersihan lingkungan dan kebersihan tubuh, seperti mandi dan mencuci pakaian.

Jika dilihat dari segi akses ke dunia luar, SAD yang didampingi oleh PKBM Berkah memiliki akses yang cukup baik. Anak-anak di

lokasi tersebut juga saat ini sudah mulai mengenyam pendidikan formal dan rata-rata sudah melek aksara. Komunitasnya pun sudah mulai terbuka dengan orang luar PKBM Mekar Sari. PKBM Mekarsari berada di Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Lembaga ini berdiri pada 2009 dan pernah mengajar keaksaraan dasar di Bukit Singkut pada 2013.

Sumber pendanaan PKBM Mekar Sari, selain dari dinas pendidikan, juga diperoleh dari kemitraan dengan warga yang dengan senang hati memberikan modal pada PKBM untuk memberikan layanan pendidikan di kawasan Bukit Singkut. Ketika menerima bantuan pada Program KD-KAT, jumlah warga belajar yang mengikuti program berjumlah 30 orang yang terbagi dalam 3 kelompok belajar. PKBM Mekar Sari memiliki tutor yang merupakan misionari yang tinggal dengan SAD dalam rangka untuk memberikan pelayanan bagi umat.

Dalam memberikan layanan pendidikan, tutor dari PKBM Mekar Sari dua di antaranya menetap bersama warga. Meskipun bahasa ibu dua tutor tersebut ialah bahasa Dayak, tetapi karena kesehariannya bergaul dengan SAD, pada akhirnya mereka dapat menguasai bahasa setempat. Sese kali tutor juga akan mengajar dengan bahasa Indonesia. Tutor yang direkrut mengaku pernah menjadi guru SD, sehingga pembelajarannya pun mengadopsi sepenuhnya dari materi pelajaran SD. Tutor tersebut juga belum pernah mengikuti pelatihan cara mengajar keaksaraan dasar bagi orang dewasa. Motivasi tutor dalam mengajar adalah ingin menjadikan SAD seperti orang luar yang memiliki penampilan yang baik dan memiliki pengetahuan.

Awal mula PKBM ini berdiri dipicu oleh pertemuan pendeta dengan pengelola PKBM yang mengatakan bahwa masih banyak warga di Sungai Kutur yang buta aksara. PKBM ini kemudian mengajukan proposal pada dinas dan satu tahun kemudian saat program KD-KAT ini diselenggarakan pemerintah, PKBM Mekar Sari terpilih menjadi salah satu PKBM yang menjalankan program pengentasan buta aksara ini. RPP dan silabus disiapkan oleh PKBM sendiri, sedangkan buku ajar yang digunakan merupakan pemberian dinas yang keseluruhannya menggunakan bahasa Indonesia. Padahal sebagian masyarakatnya masih menggunakan bahasa Rimba sebagai bahasa keseharian.

Jadwal pembelajaran di PKBM Mekar Sari sebanyak 2 jam, yaitu jam 14.00-16.00. Yang berbeda dari PKBM sebelumnya adalah tidak ada pemisahan kelas antara perempuan dan laki-laki. Hal ini bisa saja disebabkan karena SAD di Desa Kutur sebagian sudah lebih terbuka dan sebagian lainnya sudah pindah agama menganut ajaran agama Kristen. Di Desa Kutur juga sudah tampak satu bangunan tua gereja Pantekosta Indonesia yang juga dijadikan tempat mengajar keaksaraan dasar di desa tersebut.

Untuk fasilitas menulis, PKBM Mekar Sari membagikan sabak atau alat tulis yang bisa langsung dihapus dan ditulis kembali. Kelemahan pada alat tulis ini ialah warga belajar tidak memiliki dokumentasi selama proses mengajar. Selain menggunakan bangunan gereja, proses belajar juga dilakukan di bangunan permanen yang terbuat dari kayu dan sudah memiliki kursi dan meja layaknya sekolah formal. Sayangnya setelah PKBM ini berakhir, warga belajar belum memperoleh SUKMA sama sekali. Untuk itu, menjadi wajar jika tidak ada yang melanjutkan pada

Paket A. Pada saat ini yang dibutuhkan oleh SAD di Desa Kutur adalah keaksaraan lanjutan berupa keterampilan dan lain sebagainya.

2. PKBM Pematang Baru

PKBM Pematang Baru berada di Jl. Riau Ibrahim, Desa Semurung, Kecamatan Air Hitam. PKBM ini sudah berdiri sejak 2010 dan belum memiliki pengalaman sebelumnya mengelola keaksaraan dasar. Biasanya PKBM ini hanya mengelola layanan berupa kesetaraan atau Paket A, B, dan C. Sumber pendanaannya hanya dari APBN atau selama ada program dari pemerintah pusat saja. Selebihnya jika tidak ada program PKBM ini mati suri. Jumlah warga belajar yang diampu selama program sebanyak 70 orang dan dibagi menjadi 7 kelompok warga belajar, masing-masing 10 orang warga belajar. PKBM ini berada di permukiman sekitar perkebunan PT SAL. Permukiman SAD tampak terbangun dengan baik. Warga belajar yang sempat diwawancarai oleh tim adalah pemuda yang cakap menggunakan gawai di tangannya.

Masyarakat di desa ini tampaknya sudah seperti masyarakat Jambi pada umumnya. Motivasi untuk bisa membaca juga terkesan lebih modern, yaitu “agar bisa menggunakan gawai dan tidak ketinggalan teknologi terkini”. Seorang warga belajar ketika diwawancarai mengaku ingin bisa membaca agar dapat mengajukan Paket A, B, dan C agar bisa bekerja di kantor atau perkebunan.

Tutor di PKBM Pematang Baru adalah guru-guru SD dan PAUD. Jumlah tenaga pengajar sejumlah 14 orang. Rata-rata adalah guru kontrak di sekolah formal di Kabupaten Sarolangun.

Mereka mengaku belum pernah mengajar keaksaraan dasar sebelumnya, namun pernah diikutkan pelatihan oleh dinas pendidikan kota Jambi untuk mengajar keaksaraan dasar bagi orang dewasa. Seperti PKBM-PKBM sebelumnya, pengelola menyiapkan silabus dan RPP sebagai panduan mengajar tutor setiap harinya.

Jadwal pembelajaran yang diselenggarakan oleh PKBM Pematang Baru yaitu Kamis dan Jumat selama 3 jam pada pukul 14.00-17.00. Namun sebagian besar jadwal pembelajaran disesuaikan dengan musim. Karena pada musim-musim tertentu, SAD akan pergi berjualan, misalnya pada musim ikan. Mau tidak mau tutor harus menyesuaikan dengan kesediaan peserta didiknya. Hal ini memang sudah menjadi perjanjian di awal mengajar untuk menyesuaikan jadwal dengan peserta didiknya.

Berbeda dengan PKBM sebelumnya, di PKBM Pematang baru dari 70 warga belajar 58 di antaranya sudah menerima SUKMA. Selebihnya, 12 warga belajar dinyatakan tidak lulus, sehingga dinyatakan belum berhak mendapatkan SUKMA. Tetapi meskipun sudah mendapatkan SUKMA, seluruh warga belajar tidak ada yang melanjutkan pada Paket A, B, atau C. Selain itu mereka juga tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti keaksaraan lanjutan dikarenakan program tersebut belum ada. PKBM tersebut memang tidak menyediakan program pendidikan kesetaraan seperti 2 PKBM sebelumnya. Untuk itu, kelanjutan program keaksaraan lanjutan menjadi program yang dinantikan oleh warga belajar di Pematang Baru.

E. Kabupaten Indragiri Hulu, Riau

Di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Program Pendidikan KD-KAT menysasar komunitas adat suku Talang Mamak. Pelaksanaan program dilakukan oleh PKBM yang berada di pusat kabupaten, sementara lokasi komunitas adat berjarak lebih dari 20 km dari sekretariat PKBM. Orang Talang Mamak merupakan sekumpulan masyarakat yang terasing dan hidup masih secara tradisional di hilir Sungai Indragiri. Masyarakat Talang Mamak dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa yang disebut dengan bahasa Talang Mamak, walaupun dalam percakapan dengan pihak di luar komunitas, mereka biasa menggunakan bahasa Melayu.

Untuk menuju Dusun Tuo Datai Talang Mamak yang terletak di hulu Sungai Gansal dan Sungai Melenai, Desa Rantau Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu di Wilayah Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dapat diakses dengan jalan darat, yaitu melalui Siberida (Pekanbaru-Siberida 285 km) dengan menggunakan mobil untuk menuju jalan bekas HPH. Perjalanan juga dapat melalui Simpang Pendowo sekitar 2,5 km dari desa Keritang, desa yang terletak di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Rute sejauh 22 km dari Simpang Pendowo hingga memasuki perbatasan wilayah TNBT atau juga yang lebih dikenal Jalan Dalex ini, sebaiknya dilakukan dengan sepeda motor.

Pengusulan komunitas adat suku Talang Mamak sebagai sasaran program ini dimulai ketika salah satu warga belajar di PKBM yang merupakan orang Talang Mamak menceritakan

bahwa masih banyak masyarakat Talang Mamak yang buta huruf. PKBM kemudian mengusulkan ke dinas agar dapat memfasilitasi pelaksanaan program keaksaraan dasar pada komunitas Talang Mamak ini. Ketika Ditbindiktara mengadakan program inilah kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu mengusulkan suku Talang Mamak sebagai sasaran program.

Dalam proses pembelajaran, PKBM merekrut anggota komunitas yang sudah dapat membaca dan menulis untuk turut mengajarkan keaksaraan dasar kepada anggota komunitas lain yang masih buta huruf. Di satu sisi, keputusan ini direspons positif karena tutor dari dalam anggota komunitas akan lebih mudah berkomunikasi dengan warga belajar. Namun di sisi lain, tutor-tutor ini umumnya tidak memiliki kemampuan mengajar keaksaraan dasar. Mereka adalah lulusan penyetaraan (Paket C) di PKBM yang tidak disiapkan untuk mengajar.

Hambatan lain adalah terbatasnya bahan ajar. Para tutor umumnya hanya menggunakan bahan ajar dari buku-buku kelas 1 SD yang dijual di pasaran. Dengan kondisi demikian, para warga belajar mengaku kesulitan dengan bahan ajar yang digunakan tersebut. Hambatan-hambatan di atas membuat di Kabupaten Indragiri Hulu, target 80% warga belajar dapat membaca, menulis, dan berhitung gagal tercapai. Ketika kami mewawancarai warga belajar, sebagian besar dari mereka kesulitan ketika diminta membaca sebuah teks sederhana atau pun menuliskan identitas diri mereka.



Proses belajar mengajar oleh tutor PKBM Wijaya Kusuma
kepada masyarakat Tengger

BAB IV

BEBERAPA CATATAN PROGRAM

KD-KAT

Bab ini akan mendiskusikan catatan kritis dari pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus (KD-KAT). Setidaknya terdapat lima hal yang menjadi catatan kami, yaitu: ketercapaian tujuan program, ketepatan sasaran program, daya jangkau program, kapasitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan program. Catatan kritis atas program ini akan menjadi dasar penyusunan strategi untuk mengoptimalkan capaian program ini di tahun-tahun berikutnya. Namun sebelumnya, di bagian awal bab ini kami akan menguraikan ketercapaian program ini pada tahun 2016-2017.

A. Ketercapaian Program

Program ini menargetkan 80% dari peserta program di masing-masing komunitas mendapatkan SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara). Surat keterangan tersebut menandakan bahwa orang yang mendapatkannya sudah memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung dasar. Berdasarkan target tersebut, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar lokasi dapat menuntaskan target tersebut.

Dari lima lokasi penelitian ini, capaian yang relatif rendah terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan sasaran komunitas adat Suku Talang Mamak. Kami melihat rendahnya capaian program di lokasi ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, lemahnya kapasitas SDM. Dari pengelola PKBM kami mendapatkan keterangan bahwa tutor dalam program ini adalah lulusan program kesetaraan paket C pada PKBM yang sama. Para tutor ini sama sekali tidak memiliki pengalaman memfasilitasi proses pembelajaran keaksaraan dasar.

Sebab lain adalah kesenjangan budaya antara pelaksana program (pengelola PKBM) dengan warga belajar. Pengelola PKBM dan beberapa tutor yang melaksanakan program di Kabupaten Indragiri Hulu ini umumnya adalah pendatang dari Jawa. Mereka sering kali mengalami hambatan komunikasi karena perbedaan bahasa. Bahan ajar yang digunakan juga tidak disesuaikan dengan konteks lokal. Jauhnya lokasi pembelajaran dari sekretariat PKBM maupun tempat tinggal tutor juga mempersulit *monitoring* proses belajar oleh PKBM.

Di Kabupaten Lanny Jaya, meskipun target 80% peserta didik telah melek aksara, tetapi kami melihat implementasi program tidak sesuai ketentuan. Pada pelaksanaan tahun 2017, kami menjumpai PKBM Wagunik yang seharusnya mendapatkan amanah untuk menjalankan program ini justru melemparkannya pada pihak lain, yaitu PKBM Longgalo dan beberapa gereja yang memang setiap minggu melaksanakan program baca tulis untuk masyarakat. Dengan demikian, meskipun secara administratif PKBM Wagunik menjalankan program ini, namun pada

kenyataannya para gembala-gembala gereja dan tutor-tutor PKBM Longgalo-lah yang melaksanakan program keaksaraan dasar.

B. Ketepatan Sasaran

Sasaran program ini ialah komunitas adat terpencil/khusus di Indonesia. Kami melihat ada dua hal yang perlu diperjelas dari isitilah komunitas adat terpencil, yaitu mengenai batasan dari “komunitas adat” dan “terpencil/khusus.” Dalam Keputusan Presiden No. 111 tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan komunitas Adat Terpencil atau yang selama ini dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan pelayanan yang baik di bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam surat keputusan presiden tersebut juga dijelaskan bahwa komunitas adat terpencil memiliki beberapa ciri meliputi: (1) berbentuk komunitas kecil, (2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan, (3) pada umumnya terpencil secara geografis dan sulit untuk dijangkau, (4) pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten, (5) peralatan dan teknologi yang digunakan masih sederhana, (6) ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi, serta (7) akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik yang terbatas.

Untuk memperoleh penjelasan batasan komunitas adat ini kami juga telah berdiskusi dengan Dr. Ade Makmur Kartawinata, Antropolog Universitas Padjajaran yang juga merupakan anggota

tim yang turut mengkonsep program ini. Menurutnya, komunitas adat adalah kesatuan sosial yang memiliki beberapa ciri meliputi: (1) dibatasi oleh satu atau lebih batas teritorial atau kawasan, (2) ditentukan oleh suatu wilayah geografis, (3) ditentukan oleh kesatuan ekologis, (4) dibatasi oleh garis batas politik-administrasi, (5) terdiri dari penduduk yang mengucapkan satu bahasa atau satu logat bahasa, (6) ditentukan oleh rasa identitas budaya penduduknya yang kuat, (7) penduduknya mengalami satu pengalaman sejarah yang sama, (8) memiliki frekuensi interaksi satu dengan yang lain merata tinggi, dan (9) susunan sosial seragam (homogen).

Berdasarkan pada kriteria di atas, dapat dinilai bahwa semua komunitas yang menjadi sasaran program ini adalah komunitas adat. Mereka adalah kelompok-kelompok sosial yang tinggal di wilayah tertentu yang hidup dengan mempertahankan nilai-nilai tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Permasalahan dalam program ini bukanlah apakah sasaran program ini adalah komunitas adat atau bukan melainkan apakah komunitas adat tersebut dapat dikategorikan “terpencil” atau tidak.

Dalam perspektif kami, keterpencilan komunitas adat setidaknya dilihat dari dua aspek. *Pertama* adalah aspek geografis, yaitu lokasi komunitas yang berada di lokasi dengan keterbatasan akses transportasi yang biasanya juga diiringi dengan keterbatasan sarana pendidikan. *Kedua* adalah aspek kultural di mana terdapat hambatan-hambatan yang bersifat kultural yang menyebabkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung secara lancar.

Dari daftar komunitas sasaran program ini, kami melihat bahwa semua komunitas sasaran adalah komunitas adat, namun tidak semuanya merupakan komunitas adat terpencil. Salah satu contohnya adalah komunitas adat Suku Tengger di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Di lokasi komunitas tersebut kami menjumpai fasilitas pendidikan lengkap sejak jenjang SD hingga SMA, akses transportasi lancar, dan tidak ada hambatan-hambatan kultural yang menghalangi interaksi antara komunitas ini dengan komunitas di luarnya.

C. Daya Jangkau Program

Idealnya program ini mampu menjangkau seluruh komponen di dalam komunitas adat. Namun dalam pelaksanaannya, kami menjumpai adanya kelompok tertentu pada komunitas adat yang tidak dapat dijangkau oleh program. Di Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Lanny Jaya, program ini tidak dapat menjangkau anggota komunitas dari kalangan laki-laki. Di Konawe Kepulauan, para tutor mengatakan bahwa para lelaki yang umumnya nelayan enggan bergabung dengan program ini karena jika harus belajar di PKBM mereka tidak dapat mencari ikan, sehingga ekonomi keluarga akan terganggu.

Sebagian dari para lelaki itu juga malu bergabung dalam program karena keikutsertaan mereka menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam calistung. Sementara itu, di Papua sebagian besar peserta program adalah perempuan karena kegiatan keaksaraan dasar erat berkaitan dengan pelayanan umat seperti pembacaan puji-pujian ketika kebaktian, di mana golongan perempuan selalu memegang peranan penting dalam upacara-upacara keagamaan semacam ini.

Sementara itu, di Kabupaten Sarolangun program tidak mampu menjangkau komunitas Suku Anak Dalam yang hidup di pedalaman hutan. Setidaknya ada tiga kesulitan yang dihadapi oleh lembaga yang akan memberi pelayanan pendidikan keaksaraan dasar bagi kelompok Suku Anak Dalam yang hidup di pedalaman hutan. *Pertama*, kesulitan akses karena kelompok ini umumnya tinggal jauh di pedalaman, sementara para tutor tinggal jauh di luar hutan. *Kedua*, kelompok Suku Anak Dalam yang tinggal di pelosok hutan ini umumnya masih memegang erat tradisi, termasuk tradisi *melangun*: berpindah-pindah tempat selama masa berkabung. Dengan kondisi ini, proses pembelajaran dengan metode yang selama ini dipraktikkan oleh PKBM akan sulit menjangkau sasaran. *Ketiga*, kelompok ini umumnya juga tidak terlalu menguasai bahasa Indonesia, sementara para tutor di PKBM umumnya tidak bisa berbahasa Suku Anak Dalam.

D. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dari lima lokasi penelitian ini, masalah yang dihadapi hampir di semua PKBM pelaksana program pendidikan KD-KAT adalah lemahnya kapasitas sumber daya manusia pendukung baik di kalangan tutor maupun pengelola program. Dalam program ini, idealnya tutor yang dilibatkan menguasai metode pengajaran keaksaraan dasar serta dapat melakukan pendekatan yang tepat kepada warga belajar dengan *setting* sosial budaya yang berbeda. Sebagaimana tutor, pengelola PKBM seharusnya juga dapat melakukan pendekatan kepada komunitas sasaran program, sehingga program dapat diterima dengan baik.

Lemahnya kapasitas SDM ini setidaknya membawa beberapa dampak, antara lain: (1) PKBM tidak mampu untuk melakukan pendekatan yang tepat kepada masyarakat sasaran, (2) PKBM tidak mampu merumuskan strategi pembelajaran yang tepat, (3) PKBM tidak mampu melakukan *monitoring* dan pendampingan atas proses belajar yang dilakukan oleh tutor, dan (4) tutor kurang mampu menyelenggarakan proses belajar yang efektif.

E. Keberlanjutan Program

Saat ini, skema program pendidikan keaksaraan dasar dan keaksaraan fungsional/terapan dijalankan secara terpisah. Artinya, tidak semua sasaran program keaksaraan dasar akan mendapatkan pelayanan program pendidikan keaksaraan fungsional/terapan. Bagi beberapa warga belajar, hal ini setidaknya mengakibatkan dua hal. *Pertama*, beberapa warga belajar merasa tidak memperoleh manfaat langsung dari proses belajar yang mereka lakukan. Hal ini dapat dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka, terutama terkait mata pencaharian mereka yang kurang membutuhkan kemampuan calistung.

Kedua, di akhir program beberapa warga belajar belum terlalu fasih membaca, menulis, dan berhitung. Program keaksaraan yang pada prinsipnya memberikan manfaat bagi warga belajar dapat dikatakan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif cepat. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan terbatas, tentu membutuhkan proses belajar yang lebih banyak dan berkelanjutan. Usia sasaran program yang di atas usia sekolah tentu membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih lama dan intens.

Tanpa adanya tindak lanjut program, kemampuan calistung yang terbatas ini akan segera memudar. Selain itu, skema program belum memberikan perhatian untuk memunculkan kader-kader dari dalam komunitas untuk mentransfer pengetahuan yang mereka miliki kepada anggota komunitas yang lain. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh kementerian, munculnya kader dapat meningkatkan capaian program pengentasan buta aksara.

BAB V

MENUJU PERBAIKAN PROGRAM

Sejak 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan program pendidikan KD-KAT. Program ini merupakan layanan pendidikan bagi warga negara buta aksara latin usia 15-59 tahun di komunitas adat terpencil/khusus agar memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia, membaca, menulis, dan berhitung untuk mendukung aktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, sebanyak 55 komunitas adat terpencil telah menjadi sasaran program ini.

Buku ini merupakan hasil penelitian evaluatif terhadap program pendidikan KD-KAT yang dilaksanakan pada 2016 dan 2017. Evaluasi dilaksanakan di 5 lokasi, yaitu Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua, Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa timur, Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi, dan Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau.

Dari lima lokasi penelitian ini, sebagian besar program telah mencapai target untuk mengentaskan 80% warga belajar dari buta aksara. Dari sisi capaian program ini, hanya Kabupaten Indragiri Hulu yang dapat dikatakan kurang berhasil. Wawancara kami

dengan warga belajar menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka belum bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar.

Sasaran program ini adalah komunitas adat terpencil. Dalam perspektif kami, keterpencilan komunitas adat setidaknya dilihat dari dua aspek. *Pertama* adalah aspek geografis, yaitu lokasi komunitas yang berada di lokasi dengan keterbatasan akses transportasi yang biasanya juga diiringi dengan keterbatasan sarana pendidikan. *Kedua* adalah aspek kultural, di mana terdapat hambatan-hambatan yang bersifat kultural yang menyebabkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung secara lancar.

Dari daftar komunitas sasaran program ini, kami melihat bahwa semua komunitas sasaran adalah komunitas adat. Namun, tidak semuanya merupakan komunitas adat terpencil. Salah satu contohnya adalah komunitas adat Suku Tengger di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Di lokasi komunitas tersebut kami menjumpai fasilitas pendidikan lengkap sejak jenjang SD hingga SMA, akses transportasi lancar, dan tidak ada hambatan-hambatan kultural yang menghalangi interaksi antara komunitas ini dengan komunitas di luarnya.

Idealnya, program ini mampu menjangkau seluruh komponen di dalam komunitas adat. Namun dalam pelaksanaannya kami menjumpai adanya kelompok tertentu pada komunitas adat yang tidak dapat dijangkau oleh program. Di Kabupaten Konawe Kepulauan dan di Kabupaten Lanny Jaya, program tidak dapat menjangkau anggota komunitas dari kalangan laki-laki. Sementara itu, di Kabupaten Sarolangun program tidak

mampu menjangkau komunitas Suku Anak Dalam yang masih hidup di pedalaman hutan.

Kami juga melihat bahwa tidak semua PKBM pelaksana program didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan kapasitas yang memadai baik dari segi pengelola PKBM maupun tutor. Lemahnya kapasitas SDM ini setidaknya membawa beberapa dampak, antara lain: (1) PKBM tidak mampu untuk melakukan pendekatan yang tepat kepada masyarakat sasaran; (2) PKBM tidak mampu merumuskan strategi pembelajaran yang tepat; (3) PKBM tidak mampu melakukan *monitoring* dan pendampingan atas proses belajar yang dilakukan oleh tutor dan (4) tutor kurang mampu menyelenggarakan proses belajar yang efektif.

Selanjutnya, saat ini skema program pendidikan keaksaraan dasar dan keaksaraan fungsional/terapan dijalankan secara terpisah. Artinya, tidak semua sasaran program keaksaraan dasar akan mendapatkan pelayanan program pendidikan keaksaraan fungsional/terapan. Bagi beberapa warga belajar, hal ini setidaknya mengakibatkan dua hal. *Pertama*, beberapa warga belajar merasa tidak memperoleh manfaat langsung dari proses belajar yang mereka lakukan. *Kedua*, di akhir program beberapa warga belajar belum terlalu fasih membaca, menulis, dan berhitung.

Tanpa tindak lanjut program, kemampuan calistung yang terbatas ini akan segera memudar. Selain itu, skema program belum memberi perhatian untuk memunculkan kader-kader dari dalam komunitas untuk mentransfer pengetahuan yang mereka miliki kepada anggota komunitas yang lain. Dengan keterbatasan yang

dimiliki oleh kementerian, munculnya kader dapat meningkatkan capaian program pengentasan buta aksara.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, penelitian ini menyarankan beberapa langkah untuk perbaikan capaian program sebagai berikut:

1. Secara konseptual, Program Pendidikan Keaksaraan Dasar-Komunitas Adat Terpencil perlu menerapkan prinsip-prinsip pendidikan berbasis budaya. Prinsip pendidikan berbasis budaya tersebut, antara lain meliputi: (1) menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan warga belajar, (2) Tutor dan warga belajar bekerja bersama, (3) Pendidikan harus memberi manfaat kepada warga belajar sebagai bagian dari komunitasnya, (4) secara teknis, proses pembelajaran dapat memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh komunitas dan lingkungan sekitarnya.
2. Agar program ini lebih tepat sasaran, diperlukan verifikasi sasaran program dengan bersandar pada indikator-indikator yang jelas. Indikator ini akan memberi justifikasi bahwa sasaran merupakan komunitas adat terpencil.
3. Diperlukan perbaikan mekanisme sosialisasi program. Sosialisasi tidak hanya mendistribusikan petunjuk teknis program ke daerah melainkan juga harus mampu memastikan pelaksana program (PKBM, Yayasan, Kelompok belajar) memahami gagasan-gagasan dari program ini.
4. Diperlukan penguatan SDM. Penguatan SDM dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi pengelola PKBM maupun tutor. Alternatif untuk

menggunakan skema SM3T untuk mendukung program ini juga dapat dilakukan.

5. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pendidikan keaksaraan dasar. Selama ini berbagai lembaga telah menjalankan program keaksaraan dasar, dan mereka relatif berhasil menjalankan program tersebut. Sebagai contoh, Sokola Institute telah bertahun-tahun menjalankan program keaksaraan di pedalaman Jambi. Selain itu, ada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Pendidikan Komunitas Adat (Japka) yang mendorong pendidikan adat di beberapa komunitas adat. Di Papua juga terdapat lembaga gereja yang berperan penting untuk membantu pengentasan buta aksara terutama di daerah pedalaman. Pelibatan lembaga-lembaga seperti itu tentunya akan membantu meningkatkan capaian program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Analytical And Capacity Development Partnership (ACDP). 2014. *Studi Perencanaan Strategis Percepatan Pendidikan Dasar di Pedesaan dan Daerah Terpencil di Tanah Papua 2014*. Jakarta: ACDP
- Bappenas. 2013. *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/ Bappenas.
- Anderson, Bobby. 2013. The Failure of Education in Papua's Highlands. Diakses melalui: <http://www.insideindonesia.org/the-failure-of-education-in-papua-s-highlands>
- Butterworth, David J. 2008. *Lessons From The Ancestors Ritual, Education, and the Ecology of Mind in an Indonesia Community*. Disertasi Doktorat pada Universitas Melbourne.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. 2016. *Petunjuk Teknis Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/ Khusus dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016*. Jakarta: Dokumen tidak diterbitkan.
- . 2017. *Petunjuk Teknis Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Tahun 2017*. Jakarta: Dokumen tidak diterbitkan
- . 2018. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/ Khusus Tahun 2018*. Jakarta: Dokumen tidak diterbitkan

- Elainberg, M. (2005). "Paradoxical Outcomes of National Schooling in the Borderland of West Kalimantan, Indonesia: The Case of the Iban", *Borneo Research Bulletin*. Vol 36 hal 163.
- Jhon C, Towner & William G, Demmert. 2003. *A Review of Research Literature on the Influences of Culturally Based Education on the Academic Performance of Native American Student*. Oregon: Northwest Regional Educational Laboratory.
- Keputusan Presiden Nomor 111 tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.
- Ostrom, Elinor. 2005. *Understanding Institutional Diversity*. New Jersey: Princeton University Press.
- . 2011. Institutional Analysis and Development: Element of the Framework in Historical Perspective dapat diakses melalui: <http://www.eolss.nett/Eolss-sampleAllChapter.aspx>.
- Ostrom, E dan Crawford, Sue. E. S. 1995. A Grammar of Institutions dalam *The American Political Science Review*, volume 89, Issue 3 (Sep.1995), p. 582-600
- Ostrom, E dan Polsi, Margaret M. 1999. *An Institutional Framework for Policy Analysis Design*. Not Published Paper.
- Ore, Gonzalo Rubio; Elsa Morales and Laura A. Heriot. 1951. *Problems of Indigenous Education*. Social Science Vol 26 No 4 pp 226-237.
- Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK), UGM. 2016. *Grand Desain Pembangunan Pendidikan Kabupaten Intan Jaya 2017 – 2037*. Yogyakarta; PPKK.

Timothy, Cameron & Bidle, Nicholas. 2012. The Benefits of Indigenous Education: Data Findings and Data Gaps at Nicholas Bidle & Boyd Hunter (ed) *Survey Analysis for Indigenous Policy in Australia*. ANU Press.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk mengentaskan buta aksara di Indonesia khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), sejak 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan telah menjalankan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/ Khusus (KD-KAT). Penelitian ini, merupakan evaluasi atas pelaksanaan program KD-KAT tahun 2016-2017 di lima lokasi yaitu: Kabupaten Lanny Jaya (Provinsi Papua), Kabupaten Konawe Kepulauan (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kabupaten Pasuruan (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi), dan Kabupaten Indragiri Hulu (Provinsi Riau). Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa program ini berhasil menjadikan sebagian besar peserta program melek aksara. Namun demikian, terdapat catatan yang perlu diperhatikan dari pelaksanaan program ini, antara lain terkait: (1) ketepatan Sasaran, (2) daya jangkau program, (3) kapasitas sumberdaya manusia, dan (4) keberlanjutan program. Berdasar temuan-temuan tersebut penelitian ini memberikan rekomendasi baik pada aspek gagasan maupun implementasi program, diantaranya melalui: (1) penerapan prinsip pendidikan berbasis budaya, (2) verifikasi sasaran program, (3) perbaikan mekanisme sosialisasi, (4) penguatan sumber daya manusia, (5) kolaborasi dengan *stakeholder*.



Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2019

ISBN 978-602-07912-4-9-1

